panrb
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

debalaks

MATERI PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

BAGIAN IV DOMAIN LAYANAN

TIM KOORDINASI SPBE NASIONAL

Kementerian PPN/ Bappenas

panrb
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

KOMINFO

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
SPBE

DIDUKUNG OLEH

UI UGM ITS PENS TEL-U UG IPB ITB UKPETRA UAD BINUS UEU UKSW UBAYA UNTAR UNUD UII UINJKT UNDIP UNBRAW USU UNPAD UTM UNAIR UNHAS UNESA UNS POLTEK PADANG CALTEX ITK

panrb
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

01. **GAMBARAN UMUM**
Prinsip Penilaian Domain Layanan

02. **ANALISIS KESENJANGAN**
Perolehan Indeks SPBE Tahun 2022

03. **ELABORASI PEMAHAMAN**
Pemenuhan Kriteria Level Indikator

04. **TINDAK LANJUT**
Saran dan Rekomendasi Tindak Lanjut

GAMBARAN UMUM

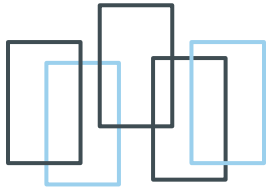

Domain Layanan Memiliki **Bobot 45,5%** pada
Instrumen Pemantauan dan Evaluasi SPBE

- Merupakan penerapan/penggunaan terhadap layanan/aplikasi sejenis, baik yang dikembangkan oleh IPPD atau menggunakan Aplikasi Umum/Pusat/Instansi lain.
- Penilaian dilakukan dengan mengukur Kapabilitas Fungsi Teknis (kemampuan/fitur teknis) yang dimiliki layanan/aplikasi tersebut berdasarkan kriteria tingkat kematangan yang telah ditetapkan, yaitu: **Informasi, Interaksi, Transaksi, Integrasi dan Optimum**.
- Data Pendukung berupa:
  - Screenshot,
  - buku manual/video tutorial pengoperasian aplikasi,
  - SOP aplikasi/ arsitektur aplikasi/dokumentasi yang dapat menunjukkan kemampuan/fitur teknis yang dimaksud.
  - Dokumentasi hasil reviu berupa notulensi, surat undangan, dan lain sebagainya

DAFTAR INDIKATOR

Setiap Indikator Layanan Berbobot **2.75% / 3%**

32 LAYANAN PERENCANAAN

33 LAYANAN PENGANGGARAN

34 LAYANAN KEUANGAN

35 LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

36 LAYANAN KEPEGAWAIAN

37 LAYANAN KEARSIPAN DINAMIS

38 LAYANAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

39 LAYANAN PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH

40 LAYANAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

41 LAYANAN KINERJA PEGAWAI

42 LAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

43 LAYANAN DATA TERBUKA

44 LAYANAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

45 LAYANAN PUBLIK SEKTOR 1

46 LAYANAN PUBLIK SEKTOR 2

47 LAYANAN PUBLIK SEKTOR 3

ANALISIS KESENJANGAN DOMAIN LAYANAN

Instansi Pusat **2021: 3,15** **2022: 3,36**

Pemerintah Daerah **2021: 2,74** **2022: 2,88**

Capaian Nasional Pada Rerata Indeks Domain Layanan SPBE	2021	2022
	2,81	2,96

01 Secara keseluruhan capaian Instansi Pusat masih lebih baik dibanding Pemerintah Daerah

02 Seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat mencapai nilai 2,6 pada Domain Kebijakan

03 Lebih dari 80% pada Kementerian, LPNK, Pemprov dan Pemkot telah mencapai nilai Baik

04 Kelompok Lembaga Lainnya dan Pemkab masih dibawah 70% yang telah mencapai predikat Baik

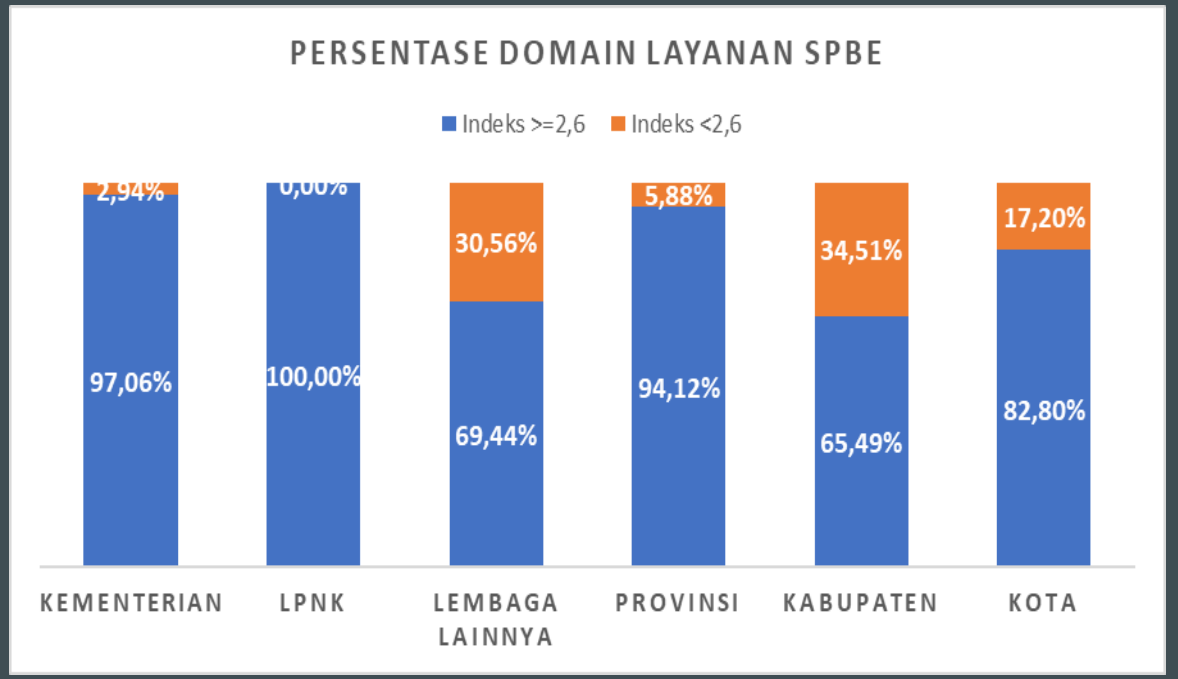

Legend :
- LPNK : Lembaga Pemerintah Non Kementerian
- Lembaga Lainnya, terdiri dari: Lembaga Setingkat Kementerian, Alat Negara, Lembaga Non Struktural, Lembaga Penyiaran Publik, dsb.

Pemenuhan Kriteria Kapabilitas Layanan

Level	Kapabilitas	Keterangan
1	Informatif	**Penjelasan**: Layanan SPBE diberikan dalam bentuk **informasi satu arah**.
		Ciri-ciri Umum: website satu arah, halaman statis, hanya menampilkan informasi-informasi.
		Keyword: halaman statis, web-portal
2	Interaktif	**Penjelasan**: Layanan SPBE diberikan dalam bentuk **interaksi dua arah**.
		Ciri-ciri Umum: tersedianya fitur komentar, live chat, fitur pencarian, form pengisian
		Keyword: komentar, live chat, pencarian, formulir
3	Transaksi	**Penjelasan**: Layanan SPBE diberikan melalui satu kesatuan **transaksi** operasi dengan menggunakan beberapa sumber daya SPBE.
		Ciri-ciri umum: adanya aliran data di dalam satu aplikasi, hal ini biasanya terwakili melalui fitur approval, validasi, tracking, analisis basis data
		Keyword: approve, setujui, reject, tolak, lacak, dashboard

Pemenuhan Kriteria Kapabilitas Layanan

Level	Kapabilitas	Keterangan
4	Kolaboratif	**Penjelasan**: Layanan SPBE diberikan melalui **integrasi/kolaborasi** antar layanan SPBE
		Ciri umum: terdapat bentuk aliran data seperti pada tingkat 3, namun berlaku antar aplikasi. Adanya service/data yang diambil dari layanan SPBE yang berbeda.
		Keyword: API, service, POST, GET, JSON
5	Optimal	**Penjelasan**: Layanan SPBE telah dilakukan **perbaikan dan peningkatan** kualitas menyesuaikan **perubahan kebutuhan** di lingkungan internal dan eksternal
		Ciri-ciri Umum: terdapat aplikasi yang telah diperbarui (versi terbaru), dengan syarat aplikasi sebelumnya telah memenuhi tingkat 4, optimalisasi kebijakan layanan, tata kelola layanan, maupun manajemen layanan
		Keyword: update, upgrade, versioning, patch, SE, SOP, manual, helpdesk

PEMENUHAN KRITERIA UMUM ASPEK LAYANAN
(SEDERHANA)

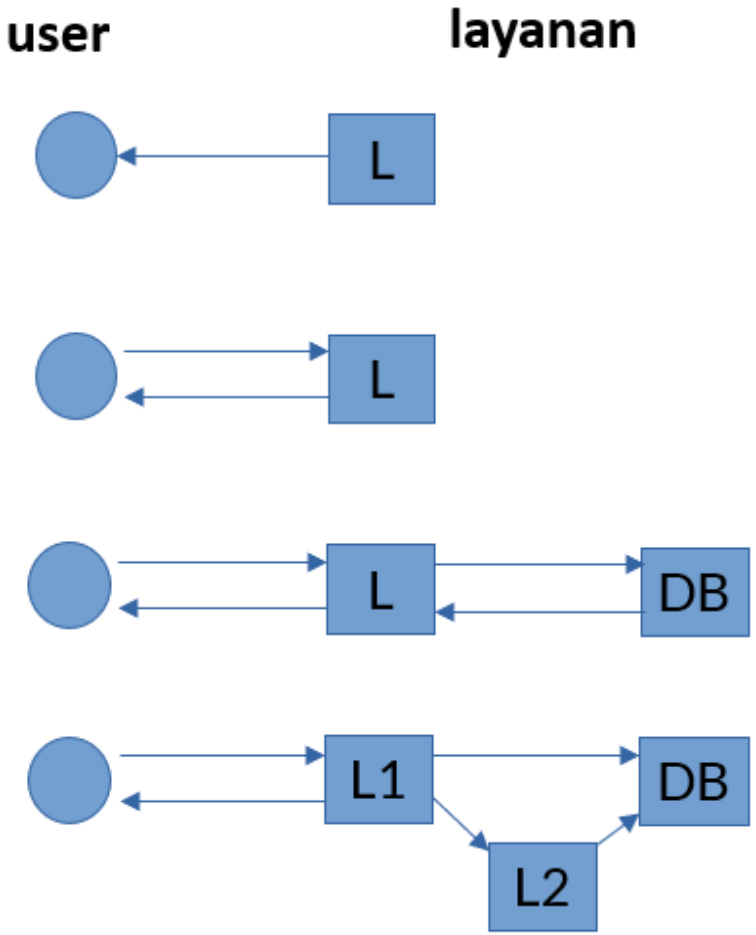

1. Memberikan informasi 1 arah
2. Pecarian informasi, pengunggahan dokumen perencanaan, dan pengunduhan dokumen
3. Layanan transaksi kepada pengguna terkait perencanaan kegiatan pemerintah seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data
4. Layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain (integrasi basis data/ middleware/layanan)
5. Dipantau, dinilai dan dievaluasi Berkala, ditindaklanjuti

Contoh Data Dukung Aspek Layanan SPBE

Level 1

Layanan Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan **informasi** terkait kegiatan pemerintah.

Kriteria: Informatif (satu arah)

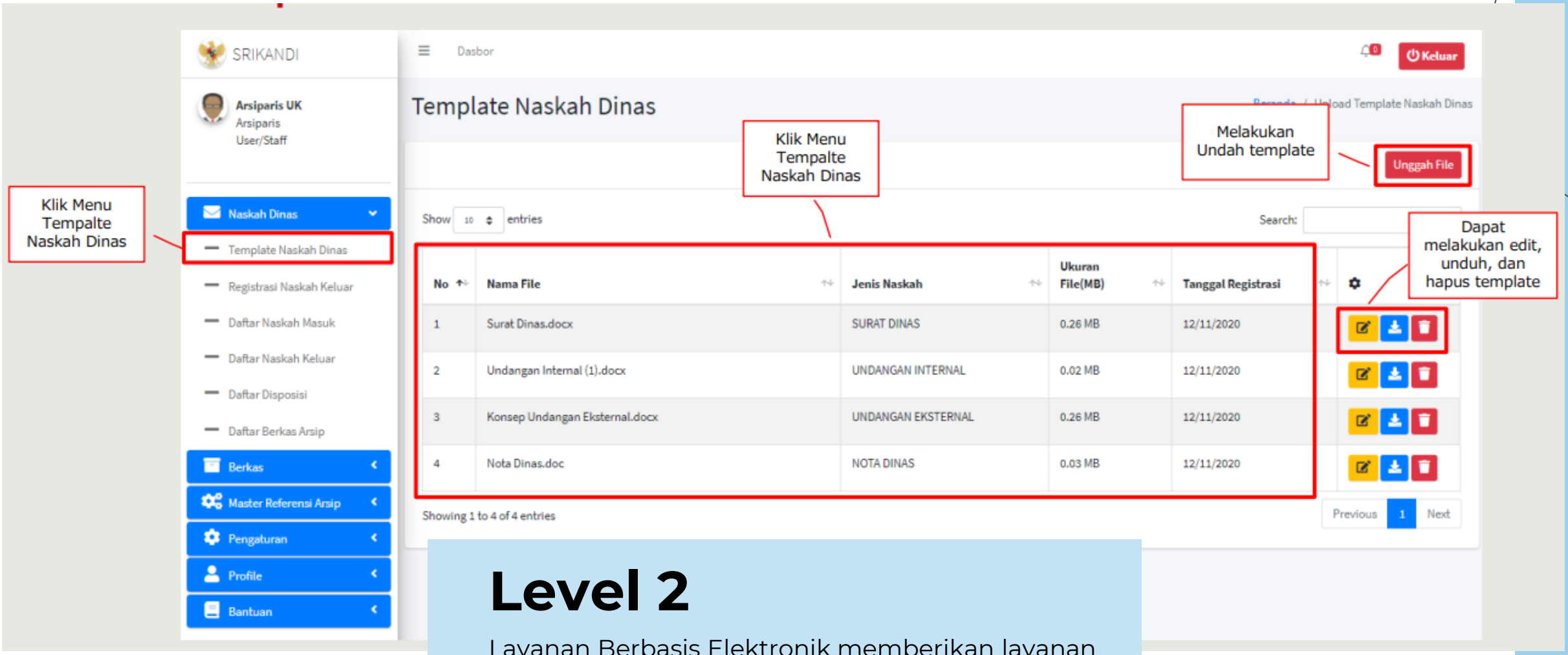

Level 2

Layanan Berbasis Elektronik memberikan layanan **interaksi** terkait urusan pemerintahan

Fitur: pencarian informasi, **pengunggahan** dokumen, dan **pengunduhan** dokumen.

Kriteria: Interaktif **(dua arah)**

Level 3

Layanan Berbasis Elektronik memberikan layanan **transaksi** kepada pengguna

Fitur: transaksi basis data, validasi data, mekanisme **persetujuan**, dan analitik data.

Kriteria: Transaksi

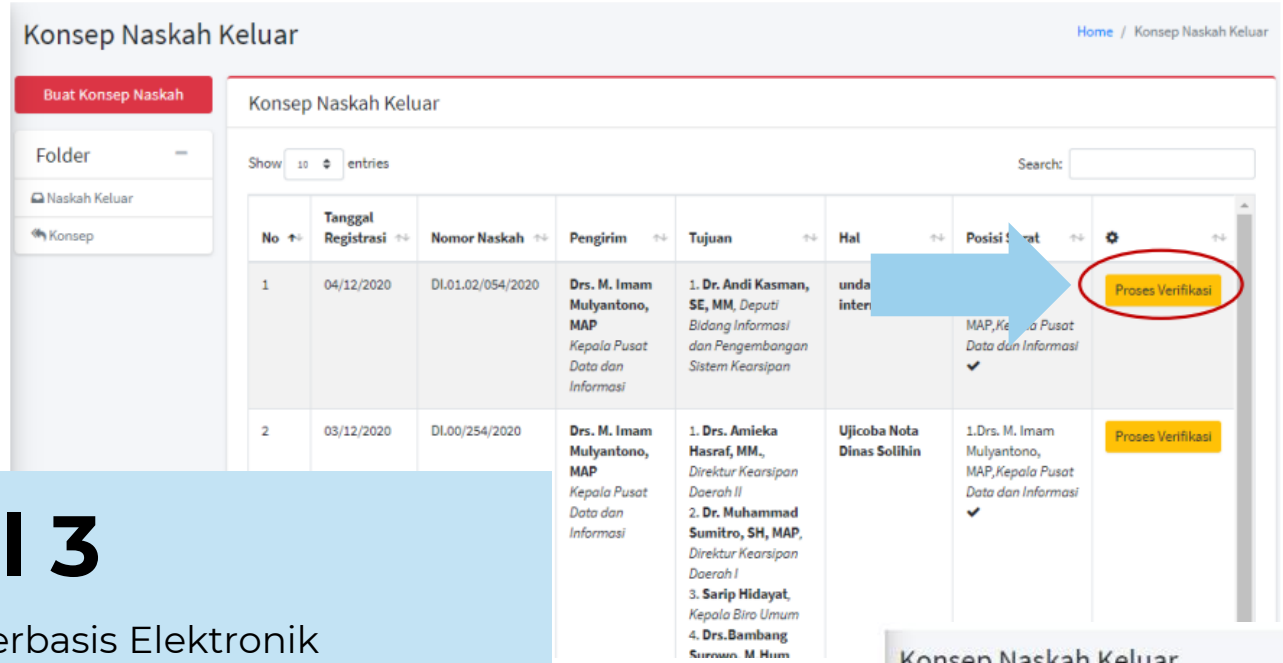

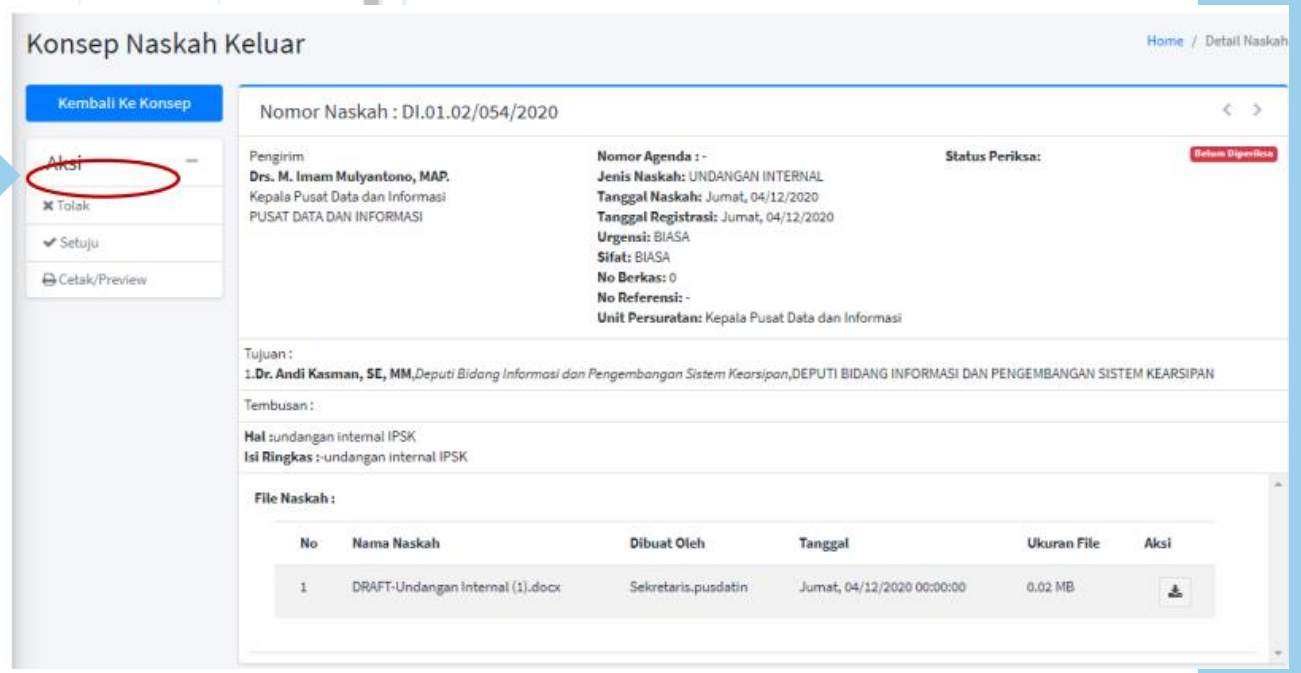

Level 4

Layanan Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, layanan sejenis IPPD lain, dan/atau layanan berbeda SPBE IPPD lain.

Kriteria: Kolaboratif

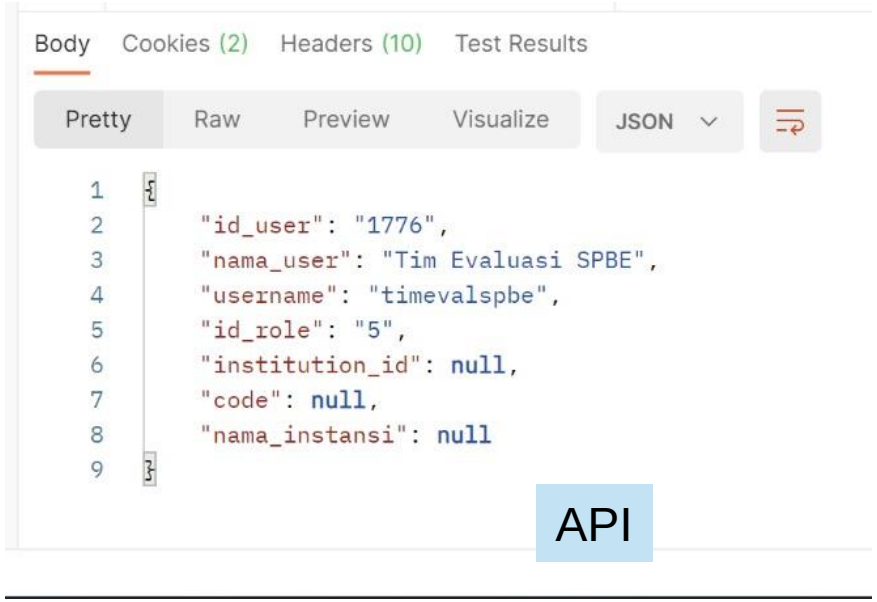

API

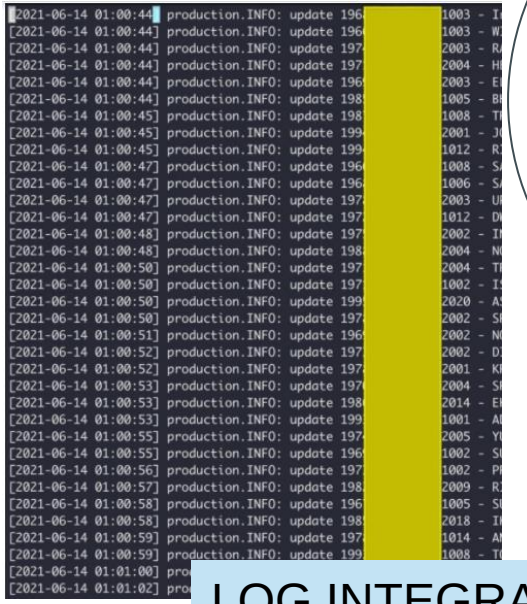

LOG INTEGRASI

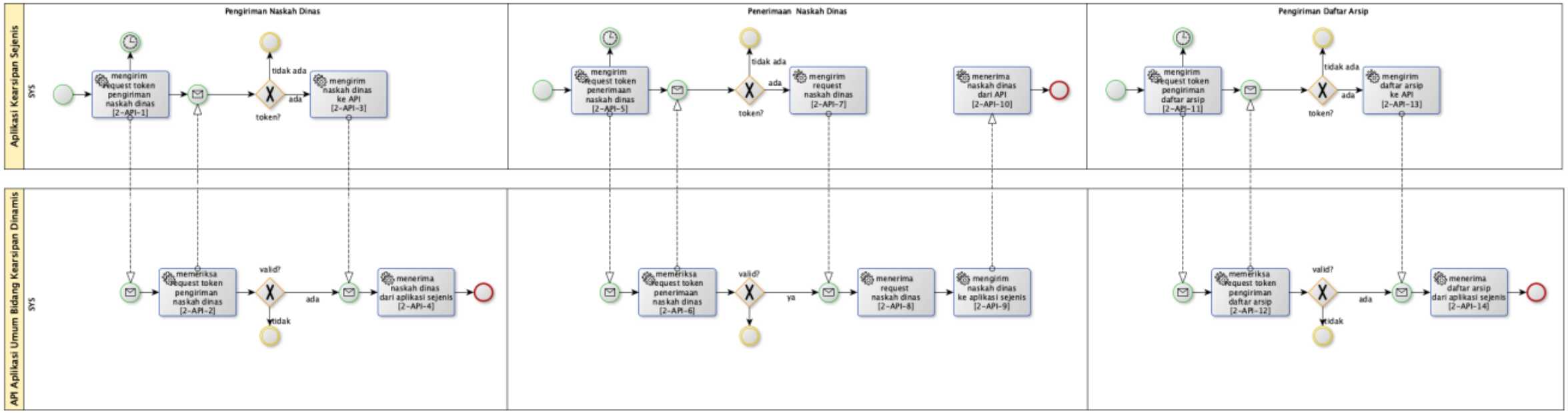

Gambar 11. API Integrasi Aplikasi Kearsipan Sejenis

Level 5

Layanan Berbasis Elektronik telah dilakukan **perbaikan** berdasarkan **hasil reviu dan evaluasi** terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Kriteria: Optimal

Tampilan Fitur Setelah Update

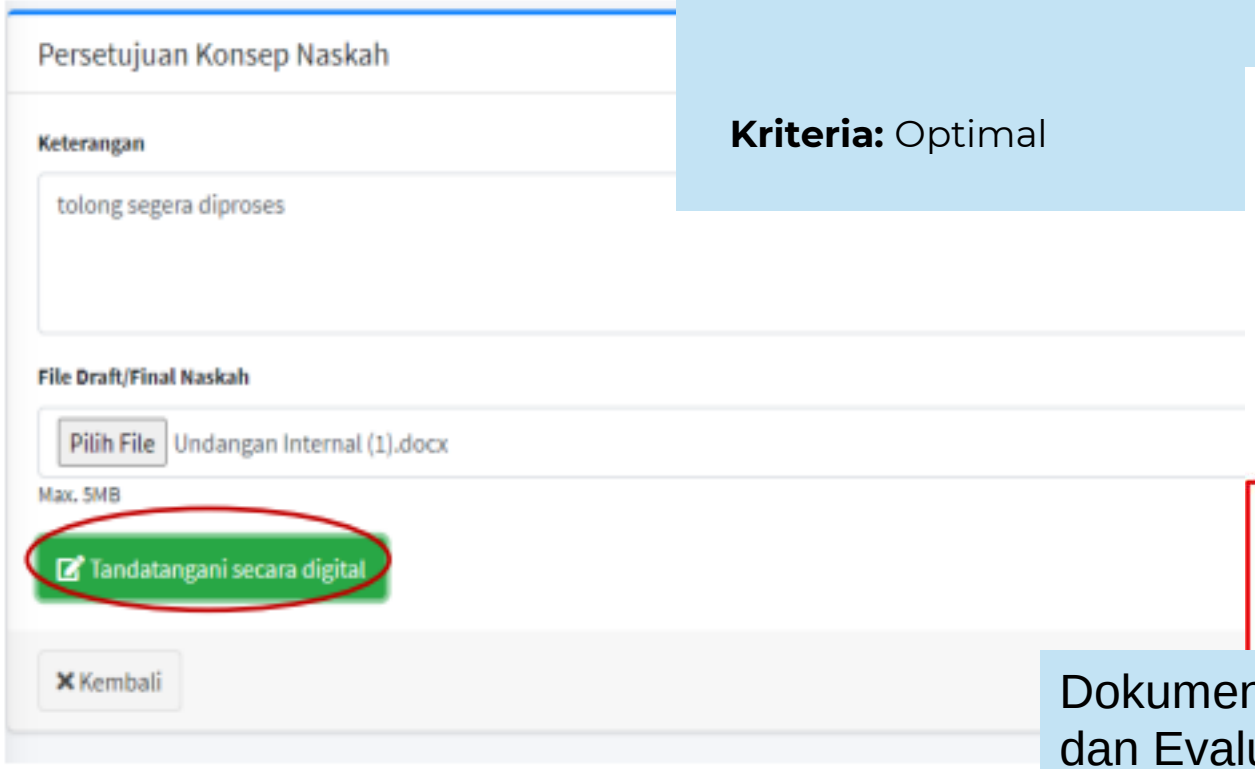

Tampilan Fitur Setelah Update

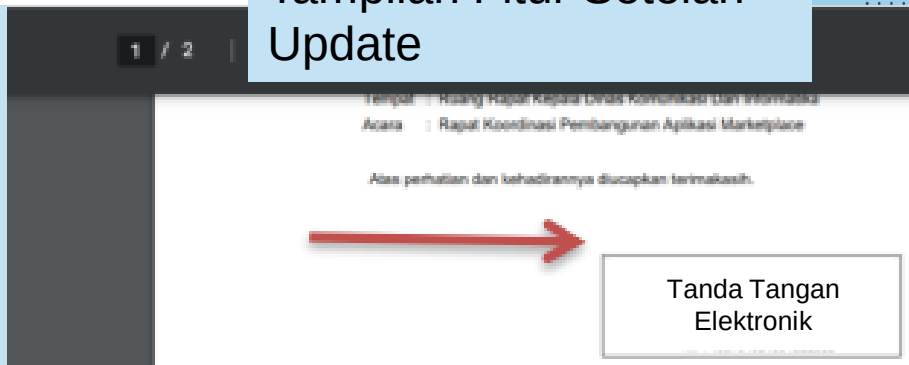

Dokumen Resmi Reviu dan Evaluasi Aplikasi

Daftar Aplikasi Umum yang telah ditetapkan

LAPOR-SP4N

KepmenPANRB No.680/2020

Aplikasi Umum Bidang Pengaduan Pelayanan Publik

SRIKANDI

KepmenPANRB No.679/2020

SRIKANDI

Sistem infoRmasI KeArsipaN Dinamis terintegrasI

Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis

SPSE

KepmenPANRB No.1148/2021

Aplikasi Umum Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

*Data Dukung Aplikasi Umum dan Berbagi Pakai

*Data di bawah ini merupakan data umum berdasarkan identifikasi. Masih terdapat kemungkinan adanya aplikasi lain yang sifatnya berbagi pakai namun belum masuk dalam daftar.

Jenis Layanan	Nama Aplikasi	Jenis Aplikasi	Data Dukung
Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	SP4N – LAPOR	Aplikasi Umum	Bukti Pemanfaatan Aplikasi oleh IPPD
Layanan Kearsipan Dinamis	SRIKANDI		
Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	SPSE		
Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Keuangan	SIPD	Aplikasi Berbagi Pakai yang Dimiliki Pemerintah Pusat	
Layanan Penganggaran, Keuangan, dan Pengadaan BMD	SIMDA		
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	KRISNA		
Layanan Keuangan	SAKTI		

*Data Dukung Aplikasi Umum dan Berbagi Pakai

*Data di bawah ini merupakan data umum berdasarkan identifikasi. Masih terdapat kemungkinan adanya aplikasi lain yang sifatnya berbagi pakai namun belum masuk dalam daftar.

Jenis Layanan	Nama Aplikasi	Jenis Aplikasi	Data Dukung
Layanan Kepegawaian	SAPK SIASN SIMPEGNAS	Aplikasi Berbagi Pakai yang Dimiliki Pemerintah Pusat	Bukti Pemanfaatan Aplikasi oleh IPPD
Layanan Kearsipan Dinamis	SRIKANDI		
Layanan Pengelolaan BMN/BMD	SIMAK BMN/SIMDA BMD SIAP BMD SIMAN		
Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	e-Audit Gol Online KPK E-Pengawasan		
Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	e-Sakip Reviu e-MONEV		
Layanan Kinerja Pegawai	SIMPEGNAS		
Layanan Data Terbuka	Satu Data Indonesia		

*Data Dukung Aplikasi Umum dan Berbagi Pakai

*Data di bawah ini merupakan data umum berdasarkan identifikasi. Masih terdapat kemungkinan adanya aplikasi lain yang sifatnya berbagi pakai namun belum masuk dalam daftar.

Jenis Layanan	Nama Aplikasi	Jenis Aplikasi	Data Dukung
Layanan Publik Sektoral	OSS SiCantik	Aplikasi Berbagi Pakai yang Dimiliki Pemerintah Pusat	Bukti Pemanfaatan Aplikasi oleh IPPD

Contoh Data Dukung Domain Layanan (Untuk Aplikasi Umum dan Aplikasi Berbagi Pakai)

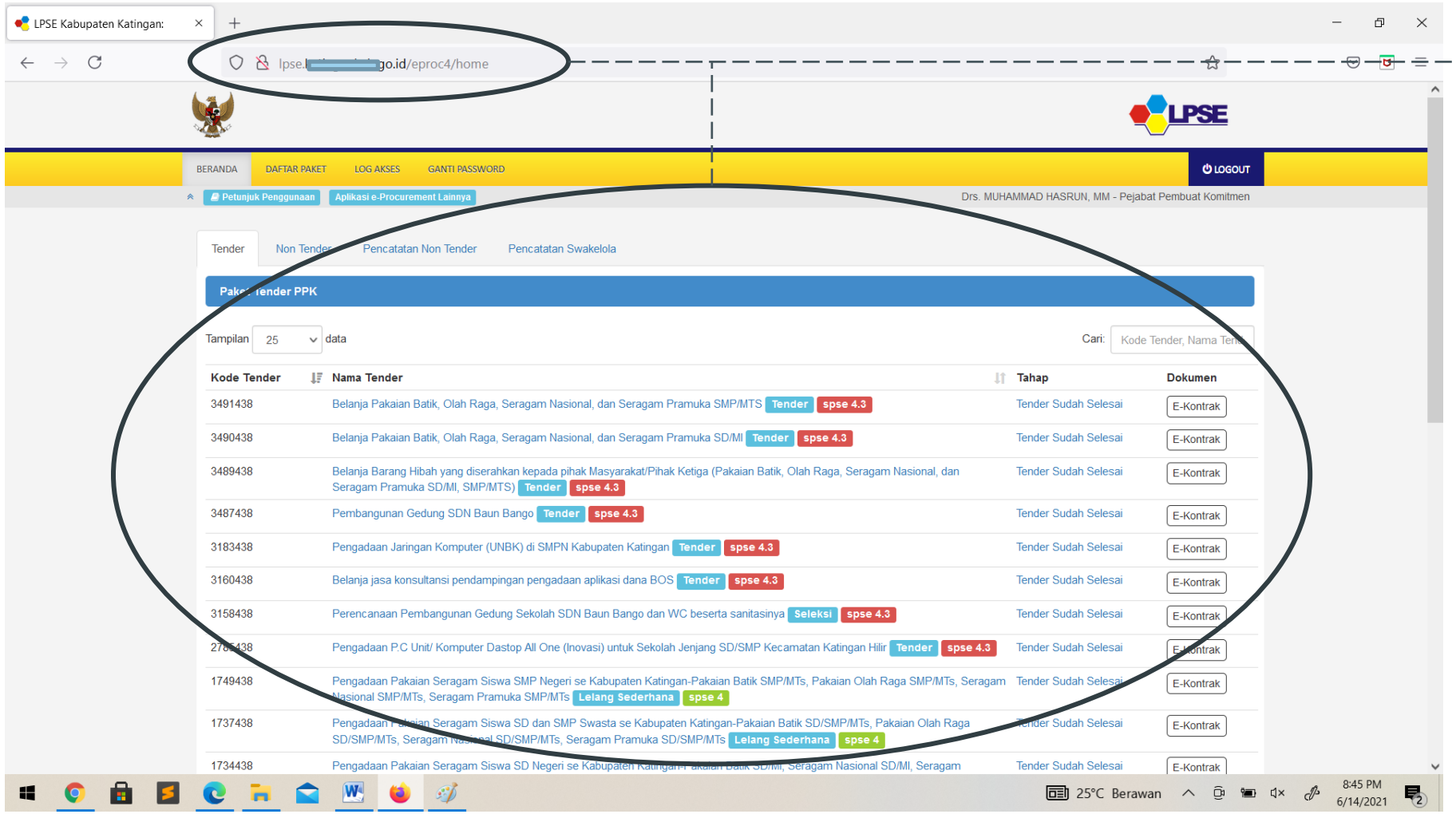

Contoh bukti dukung pemanfaatan **aplikasi LPSE (bagian dari SPSE)** sebagai **Layanan Pengadaan Barang dan Jasa**

Penyajian bukti dukung yang menunjukkan bahwa IPPD telah menggunakan **Aplikasi Umum** yang telah ditetapkan.

Contoh Data Dukung Domain Layanan (Untuk Aplikasi Umum dan Berbagi Pakai)

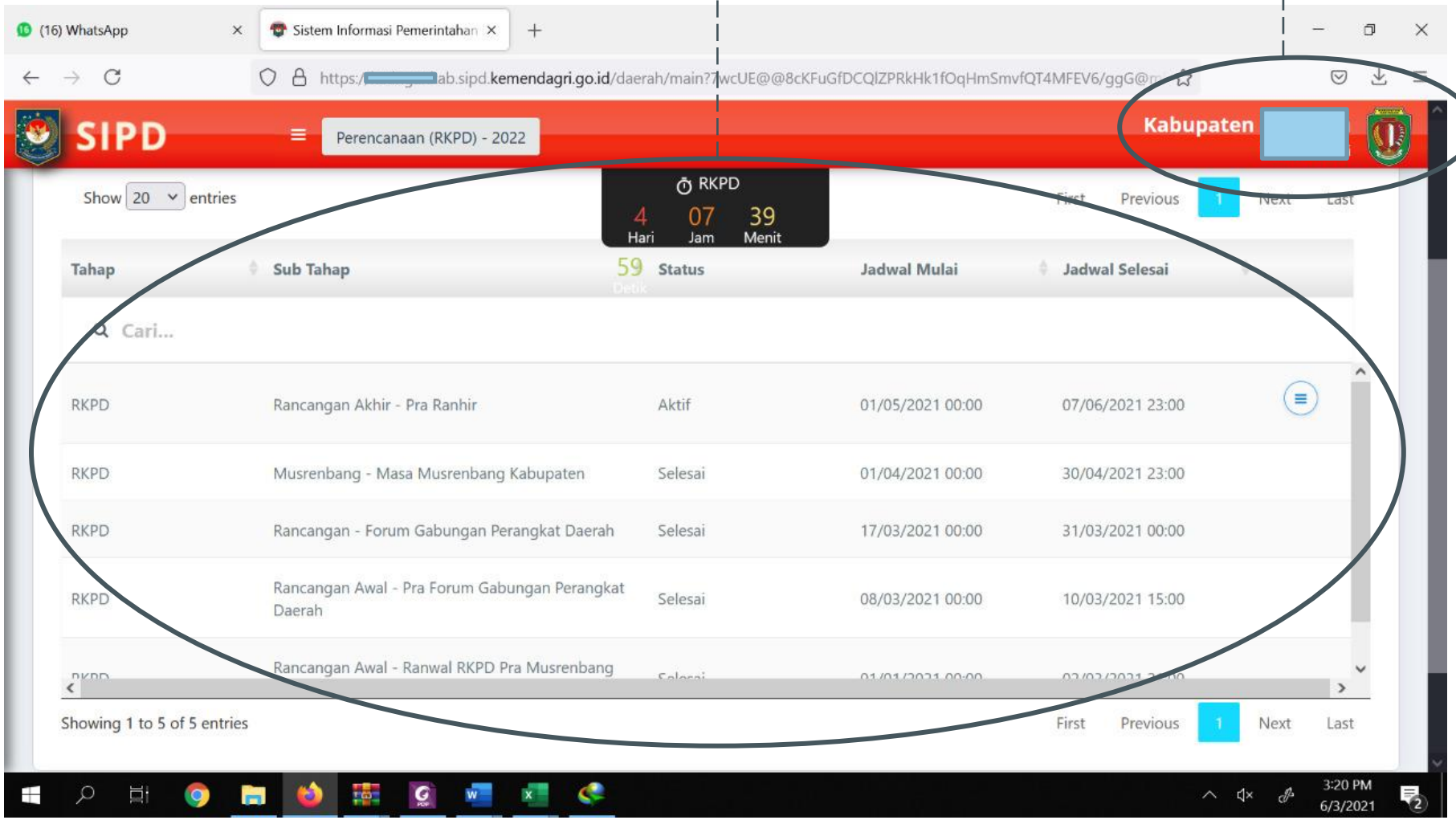

Contoh bukti dukung pemanfaatan **aplikasi SIPD** sebagai **Layanan Perencanaanan**

Penyajian bukti dukung yang menunjukkan bahwa IPPD telah menggunakan **Aplikasi berbagi pakai** yang disediakan pemerintah pusat

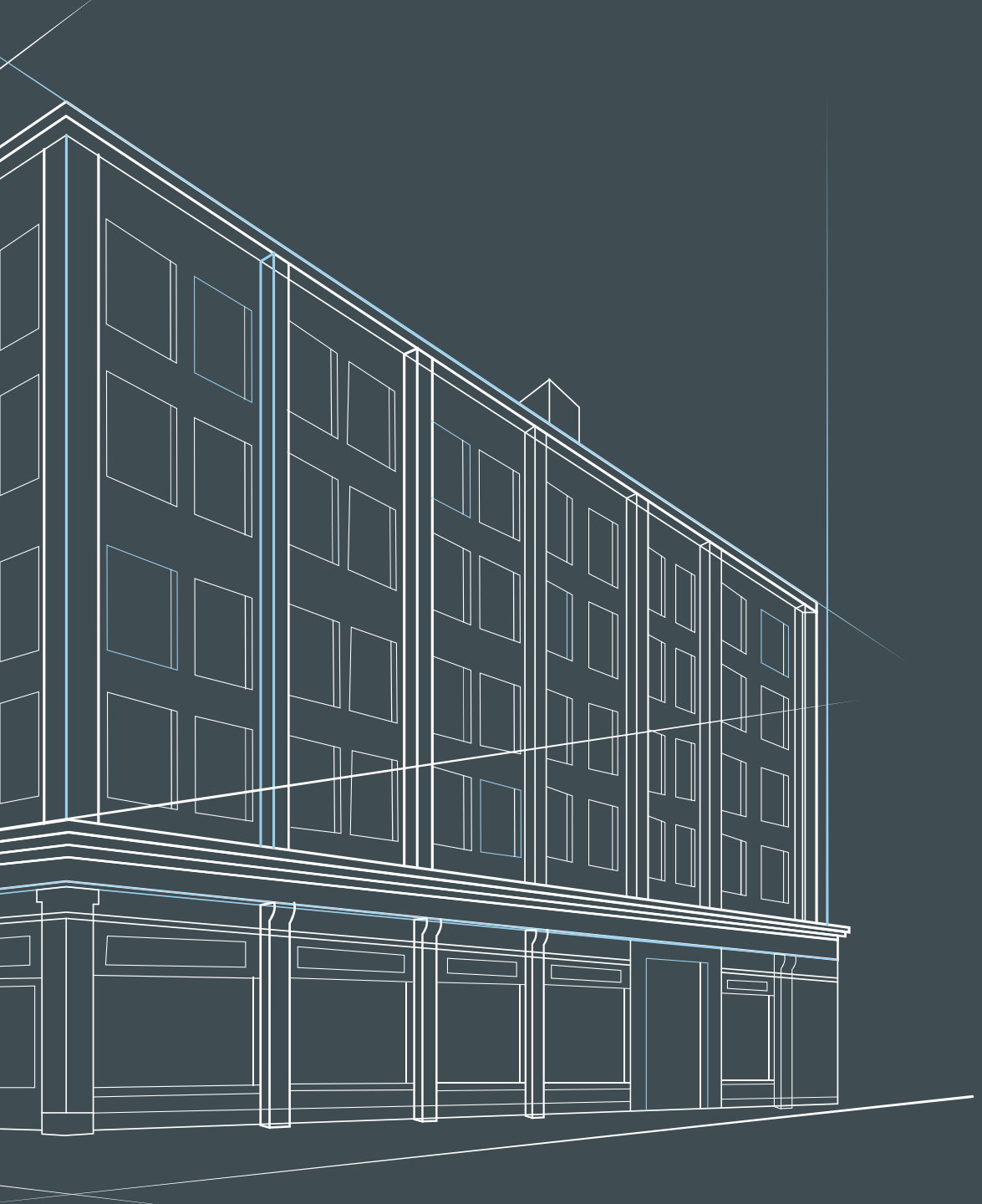

32

INDIKATOR 32

Layanan Perencanaan

LAYANAN PERENCANAAN

"Perencanaan adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan perencanaan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik merupakan keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan perencanaan IPPD."

TUJUAN/MANFAAT

- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
- Memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan perencanaan IPPD
- Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan proses Bisnis perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi

Ruang Lingkup	- Layanan perencanaan berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh pada unit kerja / perangkat daerah dan **didokumentasikan berdasarkan kapabilitas fungsi teknis**
	  - Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi
	  - Penjelasan mengenai penerapan
	  - Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)

REFERENSI LAYANAN PERENCANAAN

- Perpres No. 95/2018 - SPBE
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE

INDIKATOR 32

Layanan Perencanaan

(1/2)

Level 1

IPPD sudah memiliki Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **diseminasi informasi** yang bersifat **satu arah** kepada pengguna layanan seperti informasi laporan jumlah perencanaan kegiatan yang tersedia

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya **informasi** perencanaan kegiatan pada IPPD yang ditayangkan oleh sistem aplikasi

Level 2

IPPD sudah memiliki Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **interaksi** seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait perencanaan kegiatan

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk **berinteraksi** dengan pengguna, seperti ada fitur pencarian, upload dan atau Download

Level 3

IPPD sudah memiliki Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan dimana **pengguna dapat mengunduh dan mengunggah** informasi perencanaan kegiatan dan sistem dapat **merespon** pengguna dengan mekanisme persetujuan dan **validasi** perencanaan kegiatan tersebut

Kriteria Bukti Dukung:
Dokumentasi dengan adanya fungsi untuk bertransaksi, selain adanya upload dan/atau download, sistem aplikasi juga memiliki fungsi transaksi data, validasi data, kemajuan status **approval** data, dan atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi

Level 4-5

INDIKATOR 32
Layanan Perencanaan

(2/2)

Level 4

IPPD sudah memiliki layanan Perencanaan Berbasis Elektronik yang dapat **berkolaborasi** dengan layanan SPBE lainya, seperti perencanaan, penganggaran, keuangan dan/atau dengan Layanan Perencanaan IPPD lainnya

Kriteria Bukti Dukung:

- Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil **integrasi layanan**/middleware/ basis data seperti ditunjukan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori **API**, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya

Level 5

IPPD sudah dapat memiliki Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik yang dapat **ditingkatkan/ dikembangkan** menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya
- Dokumentasi tindak lanjut/pengembangan juga dapat berupa optimalisasi kebijakan layanan, tata Kelola layanan, maupun manajemen layanan
- Terdapat **notulensi** dan hasil **reviu** dan **rekomendasi** tindak lanjut pengembangan layanan SPBE untuk aktivitas analisis komparasi atau **penyempurnaan** layanan SPBE

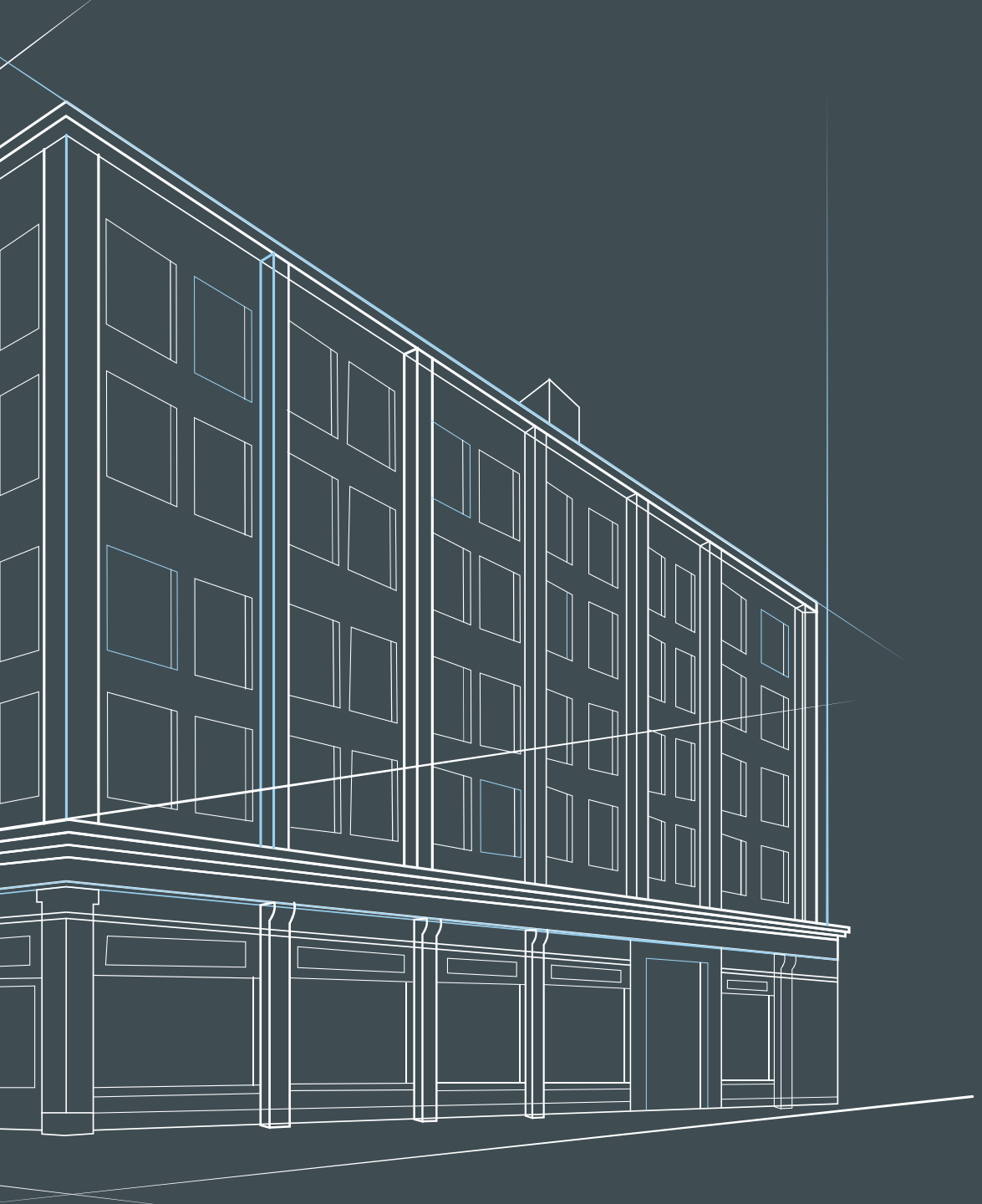

33

INDIKATOR 33

Layanan Penganggaran

LAYANAN PENGANGGARAN

"Penganggaran adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan penganggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel. Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam Pengelolaan Penganggaran Instansi Pusat dan/atau Pemerintah daerah."

TUJUAN/MANFAAT

- Memberikan nilai manfaat dalam Pengelolaan Penganggaran Instansi Pusat dan/atau Pemerintah daerah.
- Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan proses Bisnis perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi

Ruang Lingkup	- Layanan penganggaran berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh pada unit kerja / perangkat daerah dan **didokumentasikan berdasarkan kapabilitas fungsi teknis**
	  - Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi
	  - Penjelasan mengenai penerapan
	  - Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)

REFERENSI LAYANAN PENGANGGARAN

- Perpres No. 95/2018 - SPBE
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE

INDIKATOR 32

Layanan penganggaran

(1/2)

Level 1

IPPD sudah memiliki Layanan penganggaran Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **diseminasi informasi** yang bersifat **satu arah** kepada pengguna layanan seperti informasi laporan jumlah penganggaran kegiatan yang tersedia

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya **informasi** penganggaran kegiatan pada IPPD yang ditayangkan oleh sistem aplikasi

Level 2

IPPD sudah memiliki Layanan penganggaran Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **interaksi** seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait penganggaran kegiatan

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk **berinteraksi** dengan pengguna, seperti ada fitur pencarian, upload dan atau Download

Level 3

IPPD sudah memiliki Layanan penganggaran Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan dimana **pengguna dapat mengunduh dan mengunggah** informasi penganggaran kegiatan dan sistem dapat **merespon** pengguna dengan mekanisme persetujuan dan **validasi** penganggaran kegiatan tersebut

Kriteria Bukti Dukung:
Dokumentasi dengan adanya fungsi untuk bertransaksi, selain adanya upload dan/atau download, sistem aplikasi juga memiliki fungsi transaksi data, validasi data, kemajuan status **approval** data, dan atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi

Level 4-5

INDIKATOR 33
Layanan penganggaran

(2/2)

Level 4

IPPD sudah memiliki layanan penganggaran Berbasis Elektronik yang dapat **berkolaborasi** dengan layanan SPBE lainya, seperti penganggaran, keuangan dan/atau dengan Layanan penganggaran IPPD lainnya

Kriteria Bukti Dukung:

- Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil **integrasi layanan**/middleware/ basis data seperti ditunjukan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori **API**, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya

Level 5

IPPD sudah dapat memiliki Layanan penganggaran Berbasis Elektronik yang dapat **ditingkatkan/ dikembangkan** menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya
- Dokumentasi tindak lanjut/pengembangan juga dapat berupa optimalisasi kebijakan layanan, tata Kelola layanan, maupun manajemen layanan
- Terdapat **notulensi** dan hasil **reviu** dan **rekomendasi** tindak lanjut pengembangan layanan SPBE untuk aktivitas analisis komparasi atau **penyempurnaan** layanan SPBE

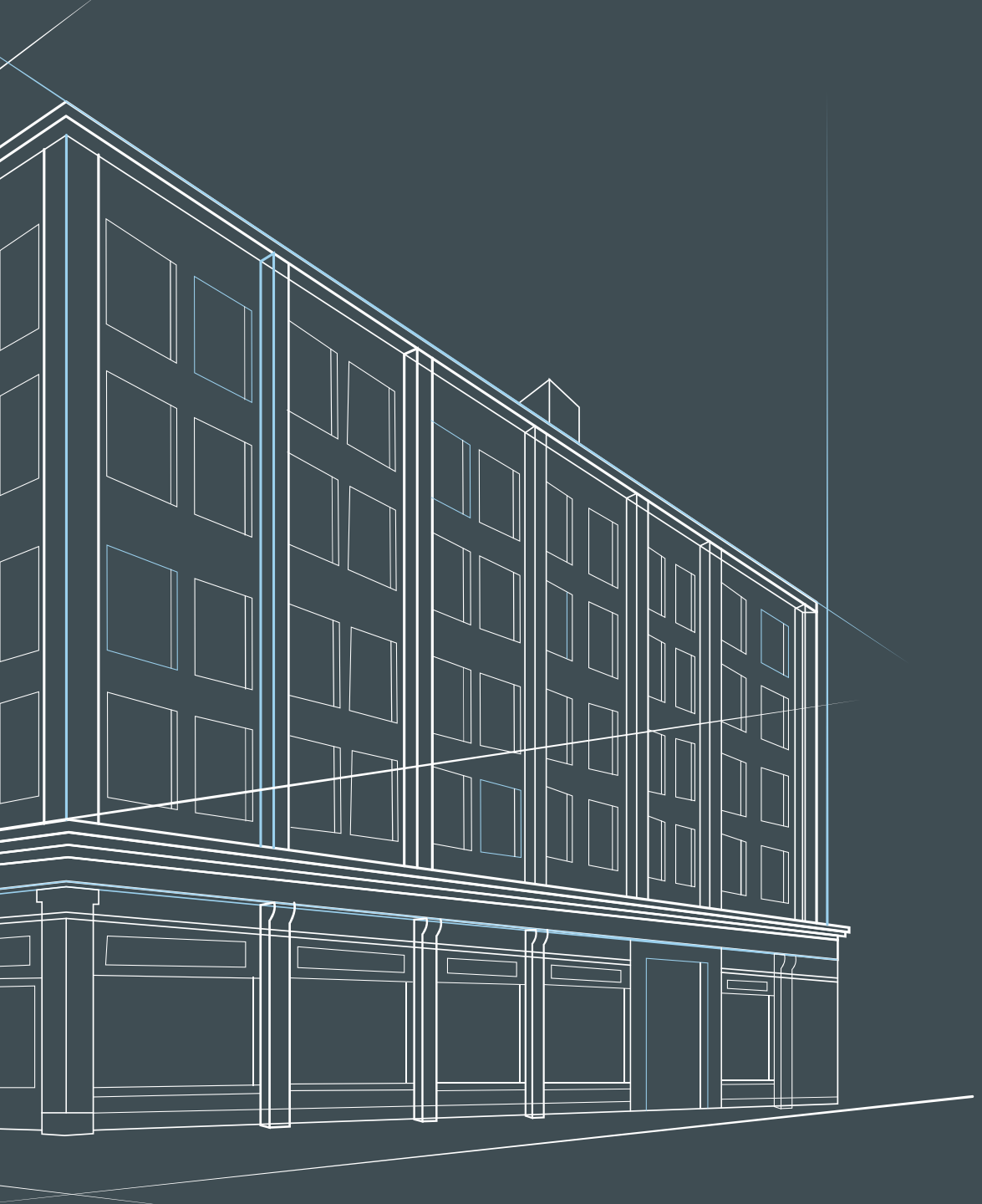

34

INDIKATOR 34

Layanan Keuangan

LAYANAN KEUANGAN

"Keuangan adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Layanan Keuangan Berbasis Elektronik adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam Pengelolaan Keuangan IPPD"

TUJUAN/MANFAAT

- Memberikan nilai manfaat dalam Pengelolaan Keuangan IPPD

Ruang Lingkup	- Layanan penganggaran berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh pada unit kerja / perangkat daerah dan **didokumentasikan berdasarkan kapabilitas fungsi teknis**
	  - Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi
	  - Penjelasan mengenai penerapan
	  - Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)

REFERENSI LAYANAN KEUANGAN

- Perpres No. 95/2018 - SPBE
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE

INDIKATOR 34

Layanan Keuangan

(1/2)

Level 1

IPPD sudah memiliki Layanan Keuangan Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **diseminasi informasi** yang bersifat **satu arah** kepada pengguna layanan seperti informasi laporan pengelolaan keuangan per triwulan

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya **informasi** Keuangan pada IPPD yang ditayangkan oleh sistem aplikasi

Level 2

IPPD sudah memiliki Layanan Keuangan Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **interaksi** seperti **mencari informasi dan mengunduh e-dokumen** terkait laporan pengelolaan keuangan

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk **berinteraksi** dengan pengguna, seperti ada fitur pencarian, upload dan atau Download dokumen keuangan

Level 3

IPPD sudah memiliki Layanan Keuangan Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan dimana pengguna dapat **mengunduh** dan **mengunggah** informasi Pengelolaan Keuangan dan sistem dapat **merespon** pengguna dengan mekanisme persetujuan dan **validasi** pencairan dana kegiatan

Kriteria Bukti Dukung:
Dokumentasi dengan adanya fungsi untuk bertransaksi, selain adanya upload dan/atau download, sistem aplikasi juga memiliki fungsi transaksi data, validasi data, kemajuan status **approval** data, dan atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi

Level 4-5

INDIKATOR 34
Layanan Keuangan

(2/2)

Level 4

IPPD sudah memiliki layanan Keuangan Berbasis Elektronik yang dapat **berkolaborasi** dengan layanan SPBE lainya, seperti perencanaan, penganggaran dan/atau dengan layanan keuangan IPPD lainnya

Kriteria Bukti Dukung:

- Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil **integrasi layanan**/middleware/ basis data seperti ditunjukan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori **API**, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya

Level 5

IPPD sudah dapat memiliki Layanan Keuangan Berbasis Elektronik yang dapat **ditingkatkan/dikembangkan** menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya
- Dokumentasi tindak lanjut/pengembangan juga dapat berupa optimalisasi kebijakan layanan, tata Kelola layanan, maupun manajemen layanan manajemen layanan
- Terdapat **notulensi** dan **hasil reviu dan rekomendasi** tindak lanjut pengembangan layanan SPBE untuk aktivitas analisis komparasi atau **penyempurnaan** layanan SPBE

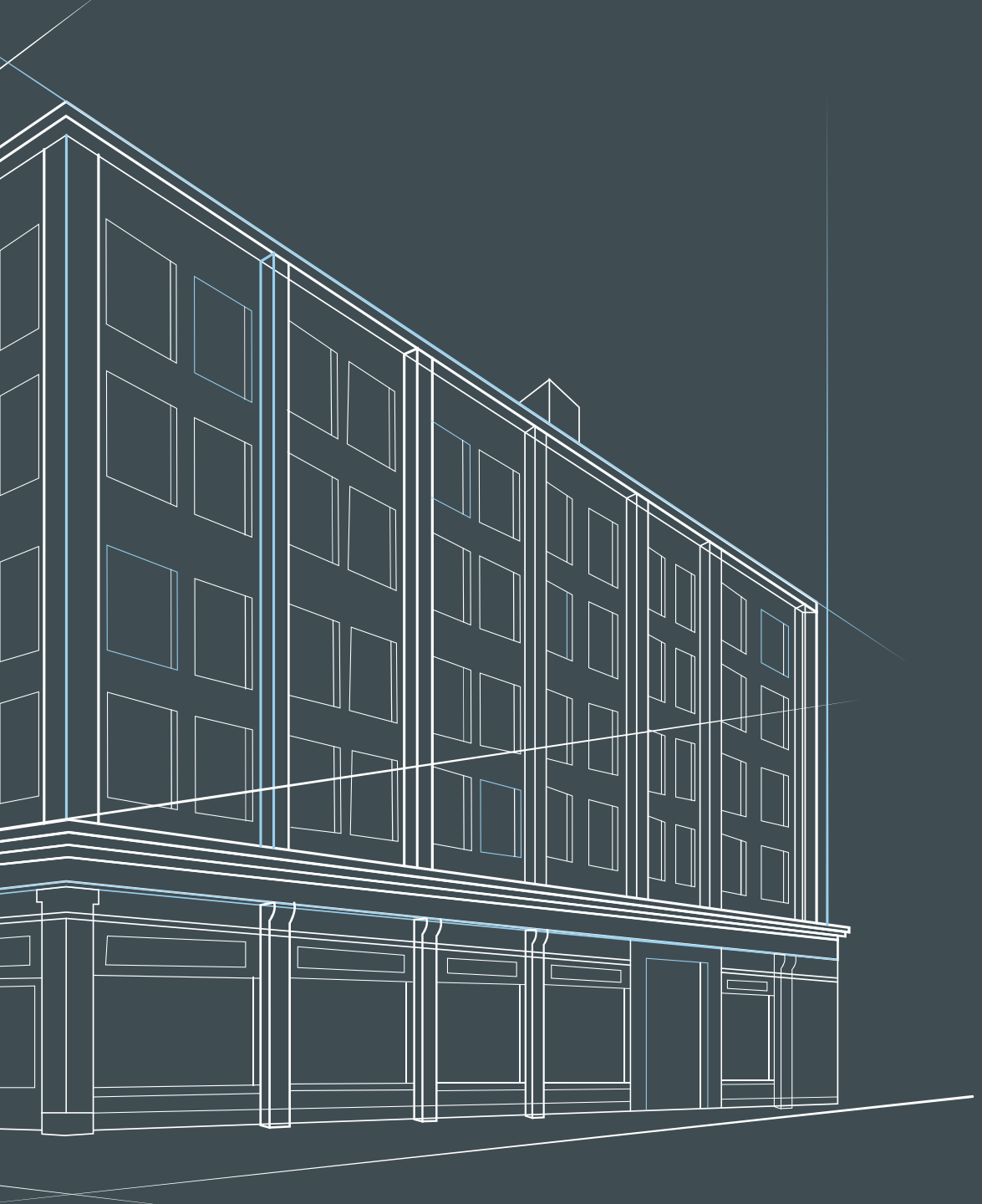

35

INDIKATOR 35

Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

"Pengadaan Barang/Jasa adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa yang efektif, efisien, dan akuntabel. Layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa IPPD."

TUJUAN/MANFAAT

- Memberikan nilai manfaat dalam Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa IPPD
- Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi

Ruang Lingkup	- Layanan Pengadaan Barang dan Jasa berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh pada unit kerja / perangkat daerah dan **didokumentasikan berdasarkan kapabilitas fungsi teknis**
	  - Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi
	  - Penjelasan mengenai penerapan
	  - Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)
	- Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, **wajib menggunakan SPSE yang telah ditetapkan sebagai Aplikasi Umum**

REFERENSI LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

- Perpres No. 95/2018 - SPBE
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- KepmenPANRB No. 1148/2021 - Aplikasi Umum Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah
- Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE

INDIKATOR 35

Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

(1/2)

Level 1

IPPD sudah memiliki Layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **diseminasi informasi** yang bersifat **satu arah** kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau progres pengadaan barang/jasa

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya **informasi** Pengadaan Barang/Jasa pada IPPD yang ditayangkan oleh sistem aplikasi

Level 2

IPPD sudah memiliki Layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **interaksi** seperti **mencari informasi dan, mengunggah dan mengunduh e-dokumen** terkait laporan pengelolaan pengadaan barang/jasa

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk **berinteraksi** dengan pengguna, seperti ada fitur pencarian, upload dan atau Download dokumen pengadaan barang dan jasa

Level 3

IPPD sudah memiliki Layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan dimana pengguna dapat **mengunduh dan mengunggah informasi** Pengadaan dan sistem dapat **merespon** pengguna dengan mekanisme persetujuan dan **validasi** dalam penetapan pemenang pengadaan barang/jasa

Kriteria Bukti Dukung:
Dokumentasi dengan adanya fungsi untuk bertransaksi, selain adanya upload dan/atau download, sistem aplikasi juga memiliki fungsi transaksi data, validasi data, kemajuan status **approval** data, dan atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi

Level 4-5

INDIKATOR 35

Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

(2/2)

Level 4

IPPD sudah memiliki layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik yang dapat **berkolaborasi** dengan layanan SPBE lainya, seperti perencanaan,penganggaran dan/atau dengan layanan pengadaan barang/jasa Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah lainnya

Kriteria Bukti Dukung:

- Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil **integrasi layanan**/middleware/ basis data seperti ditunjukan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori **API**, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya

Level 5

IPPD sudah dapat memiliki Layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik yang dapat **ditingkatkan/dikembangkan** menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya
- Dokumentasi tindak lanjut/pengembangan juga dapat berupa optimalisasi kebijakan layanan, tata Kelola layanan, maupun manajemen layanan
- Terdapat **notulensi** dan **hasil reviu dan rekomendasi** tindak lanjut pengembangan layanan SPBE untuk aktivitas analisis komparasi atau **penyempurnaan** layanan SPBE
- IPPD dapat diberikan tingkat kematangan level 5 **secara otomatis** apabila sudah menggunakan aplikasi SPSE dan memiliki Indeks Implementasi Katalog Lokal/Sektoral ≥80%

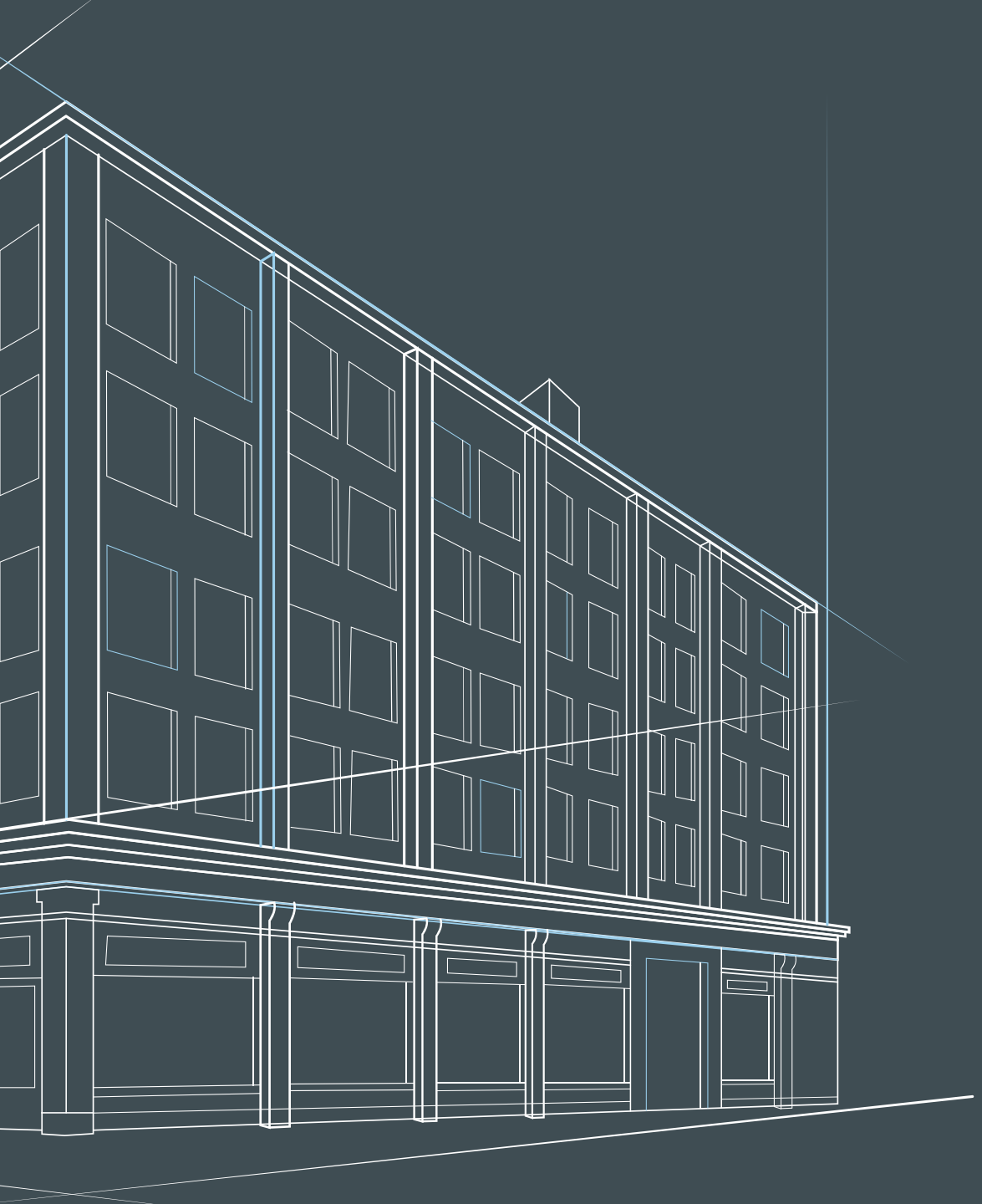

36

INDIKATOR 36

Layanan Kepegawaian

LAYANAN KEPEGAWAIAN

“Kepegawaian adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan kepegawaian yang efektif, efisien, dan akuntabel. Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam Pengelolaan Kepegawaian IPPD.”

TUJUAN/MANFAAT

- Memberikan nilai manfaat dalam Pengelolaan Manajemen Kepegawaian IPPD
- Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan antar layanan SPBE
- Untuk efisiensi dan transparansi dalam manajemen ASN

Ruang Lingkup	- Layanan Kepegawaian berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh pada unit kerja / perangkat daerah dan **didokumentasikan berdasarkan kapabilitas fungsi teknis**
	  - Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi
	  - Penjelasan mengenai penerapan
	  - Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)

REFERENSI LAYANAN KEPEGAWAIAN

- Perpres No. 95/2018 - SPBE
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE

INDIKATOR 36

Layanan Kepegawaian

(1/2)

Level 1

IPPD sudah memiliki Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **diseminasi informasi** yang bersifat **satu arah** kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau progres pengadaan barang/jasa

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya **informasi** Kepegawaian pada IPPD yang ditayangkan oleh sistem aplikasi

Level 2

IPPD sudah memiliki Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **interaksi** seperti mencari informasi dan, **mengunggah dan mengunduh** e-dokumen terkait Pengelolaan Kepegawaian seperti Daftar Riwayat Hidup (DRH) Pegawai

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk **berinteraksi** dengan pengguna, seperti ada fitur pencarian, upload dan atau Download dokumen administrasi kepegawaian

Level 3

IPPD sudah memiliki Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan dimana pengguna dapat **mengunduh dan mengunggah informasi** Kepegawaian dan sistem dapat **merespon** pengguna dengan mekanisme persetujuan dan **validasi** dalam permohonan cuti tahunan, tugas belajar, dsb

Kriteria Bukti Dukung:
Dokumentasi dengan adanya fungsi untuk bertransaksi, selain adanya upload dan/atau download, sistem aplikasi juga memiliki fungsi transaksi data, validasi data, kemajuan status **approval** data, dan atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi

Level 4-5

INDIKATOR 35
Layanan Kepegawaian

(2/2)

Level 4

IPPD sudah memiliki layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik yang dapat **berkolaborasi** dengan layanan SPBE lainya, seperti perencanaan, kearsipan dan/atau dengan layanan kepegawaian Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah lainnya

Kriteria Bukti Dukung:

- Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil **integrasi layanan**/middleware/ basis data seperti ditunjukan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori **API**, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya

Level 5

IPPD sudah dapat memiliki Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik yang dapat **ditingkatkan /dikembangkan** menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya
- Dokumentasi tindak lanjut/pengembangan juga dapat berupa optimalisasi kebijakan layanan, tata Kelola layanan, maupun manajemen layanan
- Terdapat **notulensi** dan **hasil reviu dan rekomendasi** tindak lanjut pengembangan layanan SPBE untuk aktivitas analisis komparasi atau **penyempurnaan** layanan SPBE

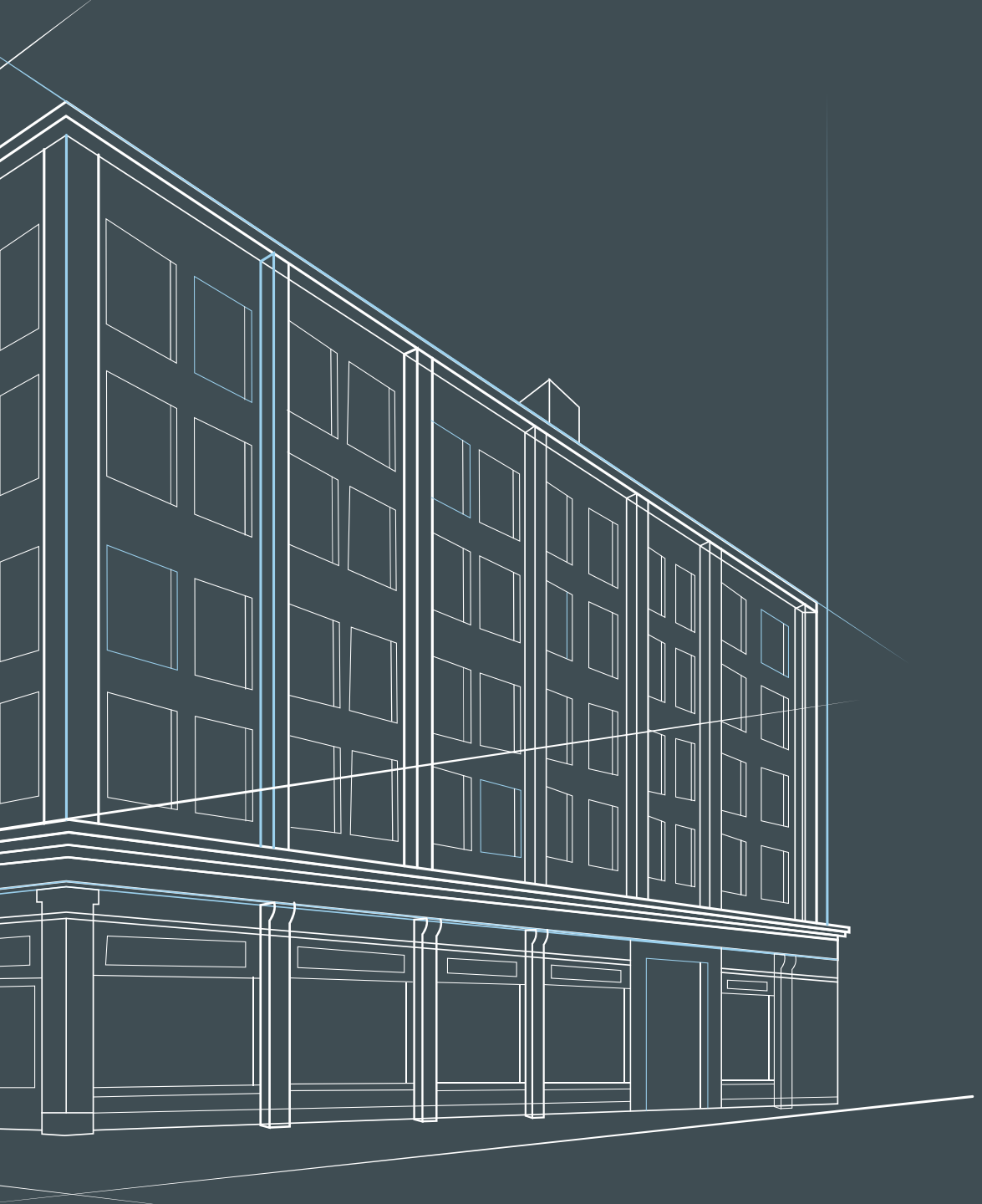

37

INDIKATOR 37

Layanan Kearsipan

LAYANAN KEPEGAWAIAN

"Kearsipan adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan kearsipan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam Pengelolaan Kearsipan IPPD."

TUJUAN/MANFAAT

- Memberikan nilai manfaat dalam Pengelolaan Kearsipan IPPD
- Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan antar layanan SPBE
- Untuk efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu

Ruang Lingkup	• Arsip terbagi menjadi:
	  ◦ **Arsip dinamis** yang merupakan dokumen/naskah dinas yang masih digunakan
	  ◦ **Arsip statis** yang merupakan dokumen/naskah dinas yang telah melewati masa retensinya
	• Layanan Kearsipan berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh pada unit kerja / perangkat daerah dan **didokumentasikan berdasarkan kapabilitas fungsi teknis**
	  ◦ Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi
	  ◦ Penjelasan mengenai penerapan
	  ◦ Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)
	• IPPD dalam melaksanakan Layanan Kearsipan Dinamis, **wajib menggunakan SRIKANDI yang telah ditetapkan sebagai Aplikasi Umum**

REFERENSI LAYANAN KEARSIPAN

- Perpres No. 95/2018 - SPBE
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- KepmenPANRB No. 679/2020 Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis
- Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE

INDIKATOR 37

Layanan Kearsipan

(1/2)

Level 1

IPPD sudah memiliki Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **diseminasi informasi** yang bersifat **satu arah** kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau statistik arsip

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya **informasi** Kearsipan pada IPPD yang ditayangkan oleh sistem aplikasi

Level 2

IPPD sudah memiliki Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **interaksi** seperti mencari informasi dan, **mengunggah dan mengunduh** e-dokumen terkait pengelolaan arsip seperti naskah dinas

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk **berinteraksi** dengan pengguna, seperti ada fitur pencarian, upload dan atau Download dokumen terkait kearsipan

Level 3

IPPD sudah memiliki Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan dimana pengguna dapat me**ngunduh dan mengunggah informasi** Pengelolaan Kearsipan dan sistem dapat **merespon** pengguna dengan mekanisme persetujuan dan **validasi** surat masuk dan surat keluar dalam alur tata naskah dinas

Kriteria Bukti Dukung:
Dokumentasi dengan adanya fungsi untuk bertransaksi, selain adanya upload dan/atau download, sistem aplikasi juga memiliki fungsi transaksi data, validasi data, kemajuan status **approval** data, dan atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi

Level 4-5

INDIKATOR 37
Layanan Kearsipan

(2/2)

Level 4

IPPD sudah memiliki layanan Kearsipan Berbasis Elektronik yang dapat **berkolaborasi** dengan layanan SPBE lainya, seperti perencanaan, penganggaran dan/atau dengan layanan kearsipan Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah lainnya

Kriteria Bukti Dukung:

- Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil **integrasi layanan**/middleware/ basis data seperti ditunjukan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya

Level 5

IPPD sudah dapat memiliki Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik yang dapat **ditingkatkan/ dikembangkan** menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya
- Dokumentasi tindak lanjut/pengembangan juga dapat berupa optimalisasi kebijakan layanan, tata Kelola layanan, maupun manajemen layanan
- Terdapat **notulensi** dan **hasil reviu dan rekomendasi tindak lanjut** pengembangan layanan SPBE untuk aktivitas analisis komparasi atau **penyempurnaan** layanan SPBE

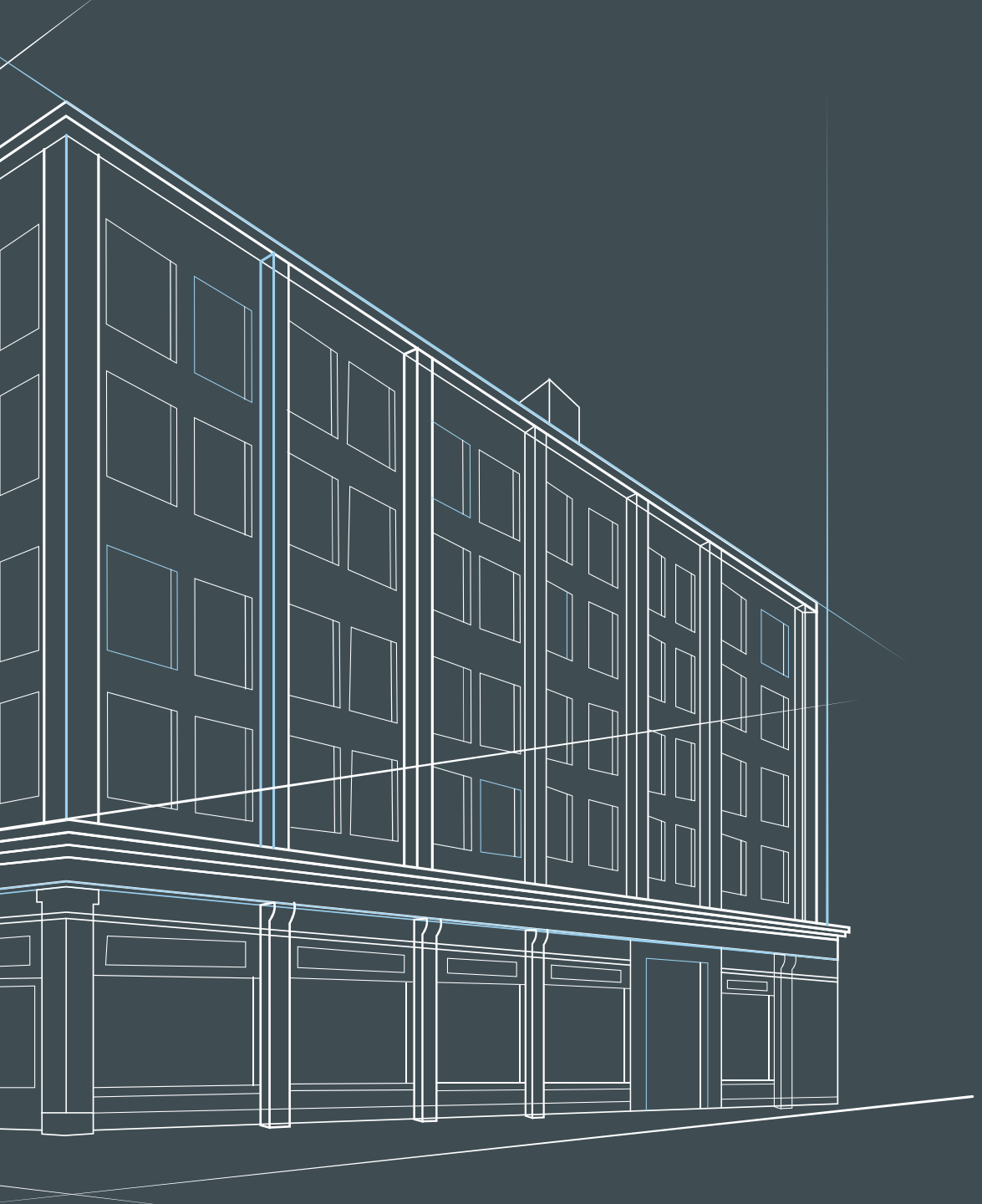

38

INDIKATOR 38

Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

LAYANAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

"Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan BMN yang efektif, efisien, dan akuntabel. Layanan Pengelolaan BMN/BMD Berbasis Elektronik adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam Pengelolaan BMN Instansi Pusat dan BMD Pemerintah Daerah."

TUJUAN/MANFAAT

- Memberikan nilai manfaat dalam Pengelolaan BMN Instansi Pusat dan BMD Pemerintah Daerah
- Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan antar layanan SPBE

Ruang Lingkup	- Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh pada unit kerja / perangkat daerah dan **didokumentasikan berdasarkan kapabilitas fungsi teknis**
	  - Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi
	  - Penjelasan mengenai penerapan
	  - Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)

REFERENSI LAYANAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

- Perpres No. 95/2018 - SPBE
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE

INDIKATOR 38

LAYANAN PENGELOLAAN BMN/D

(1/2)

Level 1

IPPD sudah memiliki Layanan Pengelolaan BMN/BMD Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **diseminasi informasi** yang bersifat **satu arah** kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau statistik Pengelolaan BMN/BMD

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya **informasi** barang milik Negara/Daerah pada IPPD yang ditayangkan oleh sistem aplikasi

Level 2

IPPD sudah memiliki Layanan Pengelolaan BMN/BMD Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **interaksi** seperti mencari informasi dan, **mengunggah dan mungunduh e-dokumen** terkait Pengelolaan BMN/BMD seperti daftar inventarisasi ruangan

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk **berinteraksi** dengan pengguna, seperti ada fitur pencarian, upload dan atau Download dokumen inventarisasi barang milik Negara/Daerah

Level 3

IPPD sudah memiliki Layanan Pengelolaan BMN/BMD Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan dimana pengguna dapat **mengunduh dan mengunggah informasi** Pengelolaan BMN/BMD dan sistem dapat **merespon** pengguna dengan mekanisme persetujuan dan **validasi** penghapusan BMN/BMD

Kriteria Bukti Dukung:
Dokumentasi dengan adanya fungsi untuk bertransaksi, selain adanya upload dan.atau download, sistem aplikasi juga memiliki fungsi transaksi data, validasi data, kemajuan status **approval** data, dan atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi

Level 4-5

INDIKATOR 38
LAYANAN PENGELOLAAN BMN/D

(2/2)

Level 4

IPPD sudah memiliki layanan Pengelolaan BMN/BMD Berbasis Elektronik yang dapat **berkolaborasi** dengan layanan SPBE lainya, seperti perencanaan, penganggaran dan/atau dengan layanan Pengelolaan BMN Instansi Pusat dan BMD Pemerintah Daerah lainnya

Kriteria Bukti Dukung:

- Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil **integrasi layanan**/middleware/ basis data seperti ditunjukan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori **API**, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya

Level 5

IPPD sudah dapat memiliki Layanan Pengelolaan BMN/BMD Berbasis Elektronik yang dapat **ditingkatkan/dikembangkan** menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya
- Dokumentasi tindak lanjut/pengembangan juga dapat berupa optimalisasi kebijakan layanan, tata Kelola layanan, maupun manajemen layanan
- Terdapat **notulensi** dan **hasil reviu dan rekomendasi** tindak lanjut pengembangan layanan SPBE untuk aktivitas analisis komparasi atau **penyempurnaan** layanan SPBE

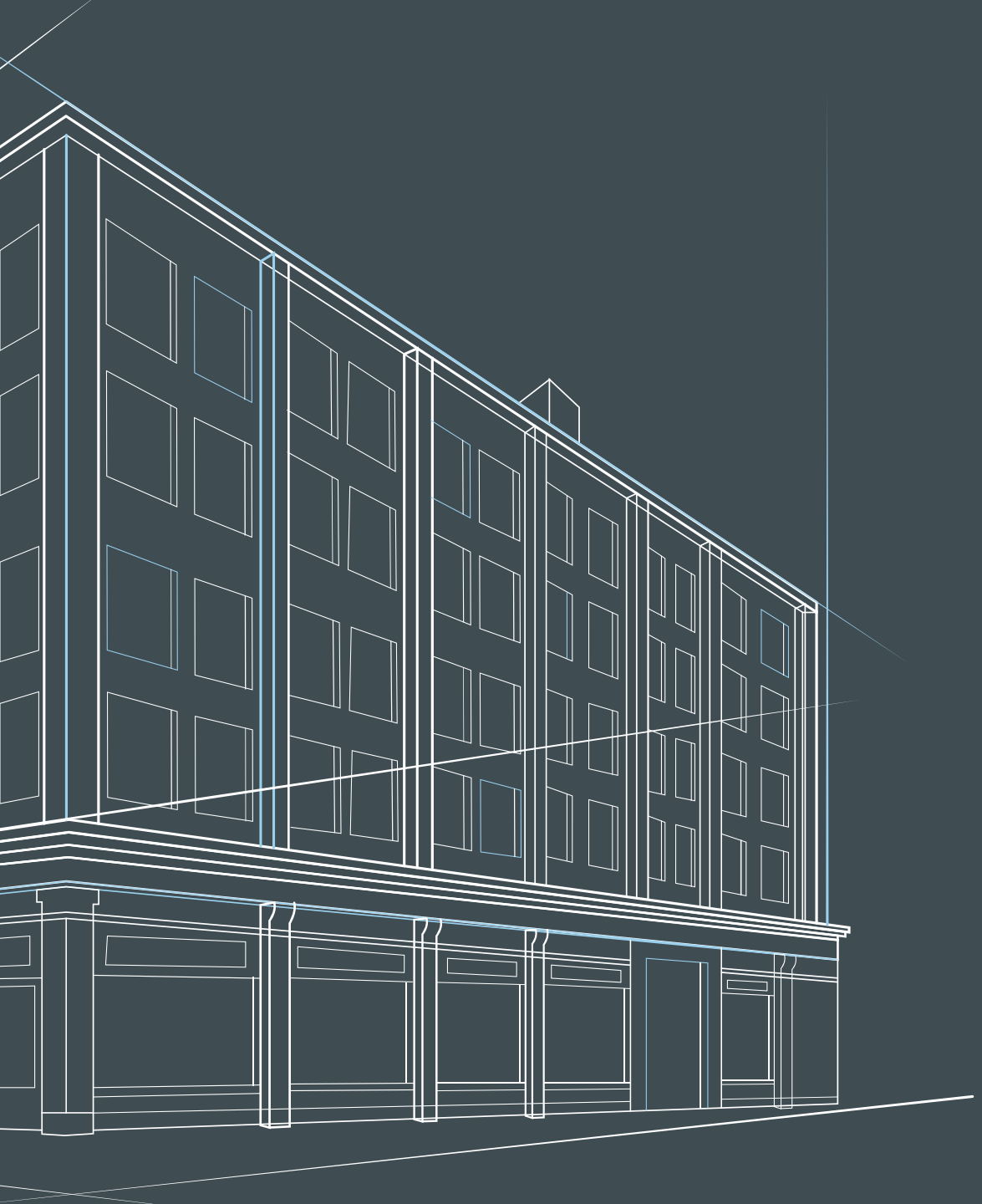

39

INDIKATOR 39

Layanan Pengawasan Internal

LAYANAN PENGAWASAN INTERNAL

"Pengawasan internal adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan pengawasan internal yang efektif, efisien dan akuntabel. Layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan Pengawasan Internal di IPPD."

TUJUAN/MANFAAT

- Memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan Pengawasan Internal di IPPD
- Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan antar layanan SPBE

Ruang Lingkup	- Layanan Pengawasan Internal berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh pada unit kerja / perangkat daerah dan **didokumentasikan berdasarkan kapabilitas fungsi teknis**
	  - Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi
	  - Penjelasan mengenai penerapan
	  - Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)

REFERENSI LAYANAN PENGAWASAN INTERNAL

- Perpres No. 95/2018 - SPBE
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE

INDIKATOR 39

Layanan Pengawasan Internal

(1/2)

Level 1

IPPD sudah memiliki Layanan Pengelolaan BMN/BMD Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **diseminasi informasi** yang bersifat **satu arah** kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau statistik Pengelolaan BMN/BMD

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya **informasi** barang milik Negara/Daerah pada IPPD yang ditayangkan oleh sistem aplikasi

Level 2

IPPD sudah memiliki Layanan Pengelolaan BMN/BMD Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **interaksi** seperti mencari informasi dan, **mengunggah dan mungunduh e-dokumen** terkait Pengelolaan BMN/BMD seperti daftar inventarisasi ruangan

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk **berinteraksi** dengan pengguna, seperti ada fitur pencarian, upload dan atau Download dokumen inventarisasi barang milik Negara/Daerah

Level 3

IPPD sudah memiliki Layanan Pengelolaan BMN/BMD Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan dimana pengguna dapat **mengunduh dan mengunggah informasi** Pengelolaan BMN/BMD dan sistem dapat **merespon** pengguna dengan mekanisme persetujuan dan **validasi** penghapusan BMN/BMD

Kriteria Bukti Dukung:
Dokumentasi dengan adanya fungsi untuk bertransaksi, selain adanya upload dan.atau download, sistem aplikasi juga memiliki fungsi transaksi data, validasi data, kemajuan status **approval** data, dan atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi

Level 4-5

INDIKATOR 39
Layanan Pengawasan Internal

(1/2)

Level 4

IPPD sudah memiliki layanan Pengelolaan BMN/BMD Berbasis Elektronik yang dapat **berkolaborasi** dengan layanan SPBE lainya, seperti perencanaan, penganggaran dan/atau dengan layanan Pengelolaan BMN Instansi Pusat dan BMD Pemerintah Daerah lainnya

Kriteria Bukti Dukung:

- Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil **integrasi layanan**/middleware/ basis data seperti ditunjukan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori **API**, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya

Level 5

IPPD sudah dapat memiliki Layanan Pengelolaan BMN/BMD Berbasis Elektronik yang dapat **ditingkatkan/dikembangkan** menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya
- Dokumentasi tindak lanjut/pengembangan juga dapat berupa optimalisasi kebijakan layanan, tata Kelola layanan, maupun manajemen layanan
- Terdapat **notulensi** dan **hasil reviu dan rekomendasi** tindak lanjut pengembangan layanan SPBE untuk aktivitas analisis komparasi atau **penyempurnaan** layanan SPBE

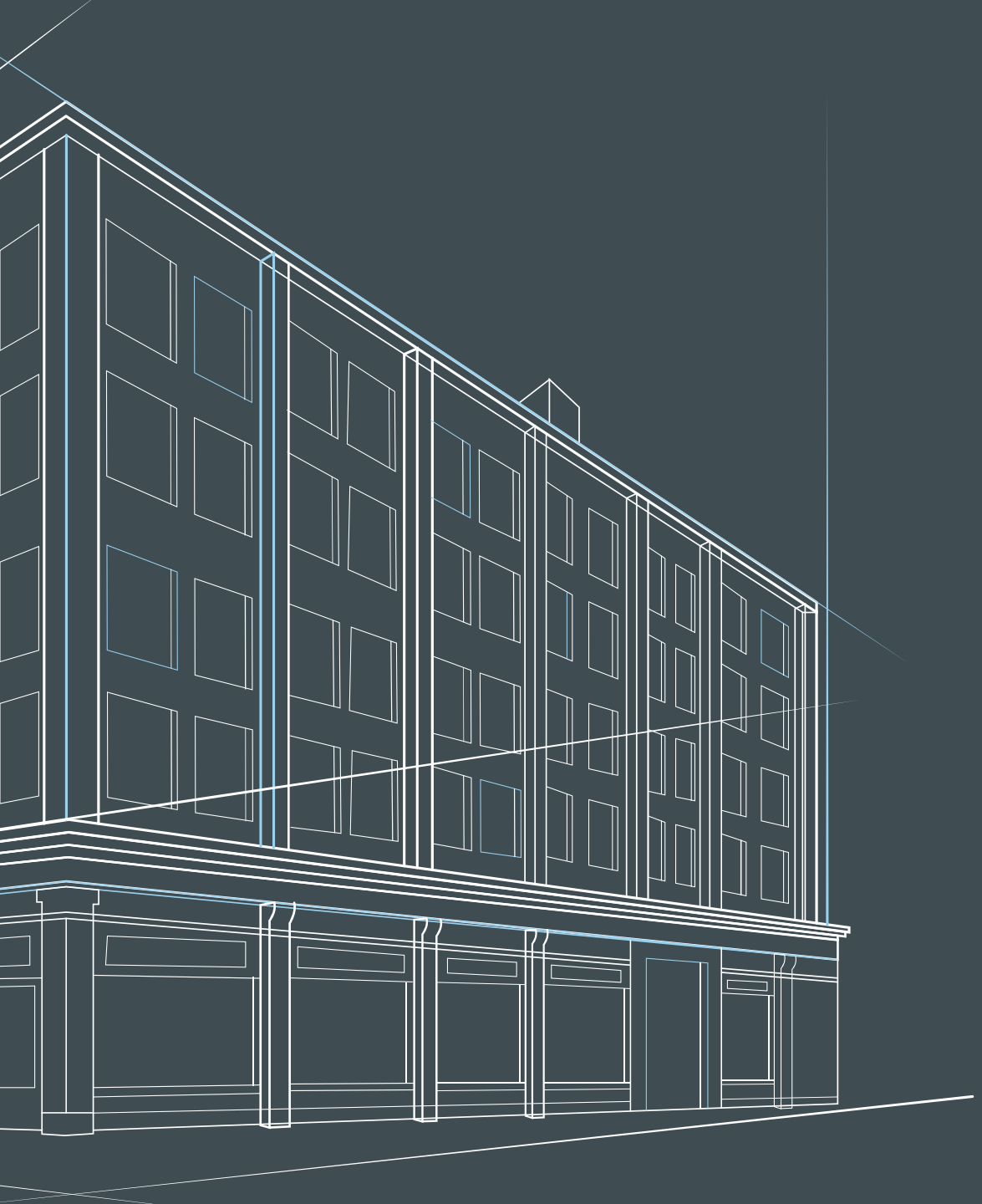

40

INDIKATOR 40

Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

LAYANAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

"Akuntabilitas Kinerja IPPD adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan Akuntabilitas Kinerja IPPD yang efektif, efisien dan akuntabel. Layanan Akuntabilitas Kinerja IPPD Berbasis Elektronik adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan Akuntabilitas Kinerja di IPPD
."

TUJUAN/MANFAAT

- Memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan Akuntabilitas Kinerja di IPPD
- Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan antar layanan SPBE

Ruang Lingkup	- Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh pada unit kerja / perangkat daerah dan **didokumentasikan berdasarkan kapabilitas fungsi teknis**
	  - Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi
	  - Penjelasan mengenai penerapan
	  - Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)

REFERENSI LAYANAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

- Perpres No. 95/2018 - SPBE
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE

INDIKATOR 40

Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

(1/2)

Level 1

IPPD sudah memiliki Layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **diseminasi informasi** yang bersifat **satu arah** kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau statistik pengawasan internal

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya **informasi** Akuntabilitas Kinerja pada IPPD yang ditayangkan oleh sistem aplikasi

Level 2

IPPD sudah memiliki Layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan **transaksi** seperti mencari informasi dan, **mengunggah dan mengunduh** informasi akuntabilitas kinerja

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk **berinteraksi** dengan pengguna, seperti ada fitur pencarian, upload dan atau Download pelaporan pada Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Level 3

IPPD sudah memiliki Layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan dimana pengguna dapat **mengunduh dan mengunggah informasi** Akuntabilitas kinerja Organisasi, dan sistem dapat **merespon** pengguna dengan mekanisme persetujuan dan **validasi**

Kriteria Bukti Dukung:
Dokumentasi dengan adanya fungsi untuk bertransaksi, selain adanya upload dan/atau download, sistem aplikasi juga memiliki fungsi transaksi data, validasi data, kemajuan status **approval** data, dan atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi

Level 4-5

INDIKATOR 40
Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

(2/2)

Level 4

IPPD sudah memiliki layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik yang dapat **berkolaborasi** dengan layanan SPBE lainya, seperti perencanaan, penganggaran dan/atau dengan layanan Akuntabilitas Kinerja IPPD lainnya

Kriteria Bukti Dukung:

- Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil **integrasi layanan**/middleware/ basis data seperti ditunjukan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori **API**, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya

Level 5

IPPD sudah dapat memiliki Layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik yang dapat **ditingkatkan/ dikembangkan** menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya
- Dokumentasi tindak lanjut/pengembangan juga dapat berupa optimalisasi kebijakan layanan, tata Kelola layanan, maupun manajemen layanan
- Terdapat **notulensi dan hasil reviu dan rekomendasi** tindak lanjut pengembangan layanan SPBE untuk aktivitas analisis komparasi atau **penyempurnaan** layanan SPBE

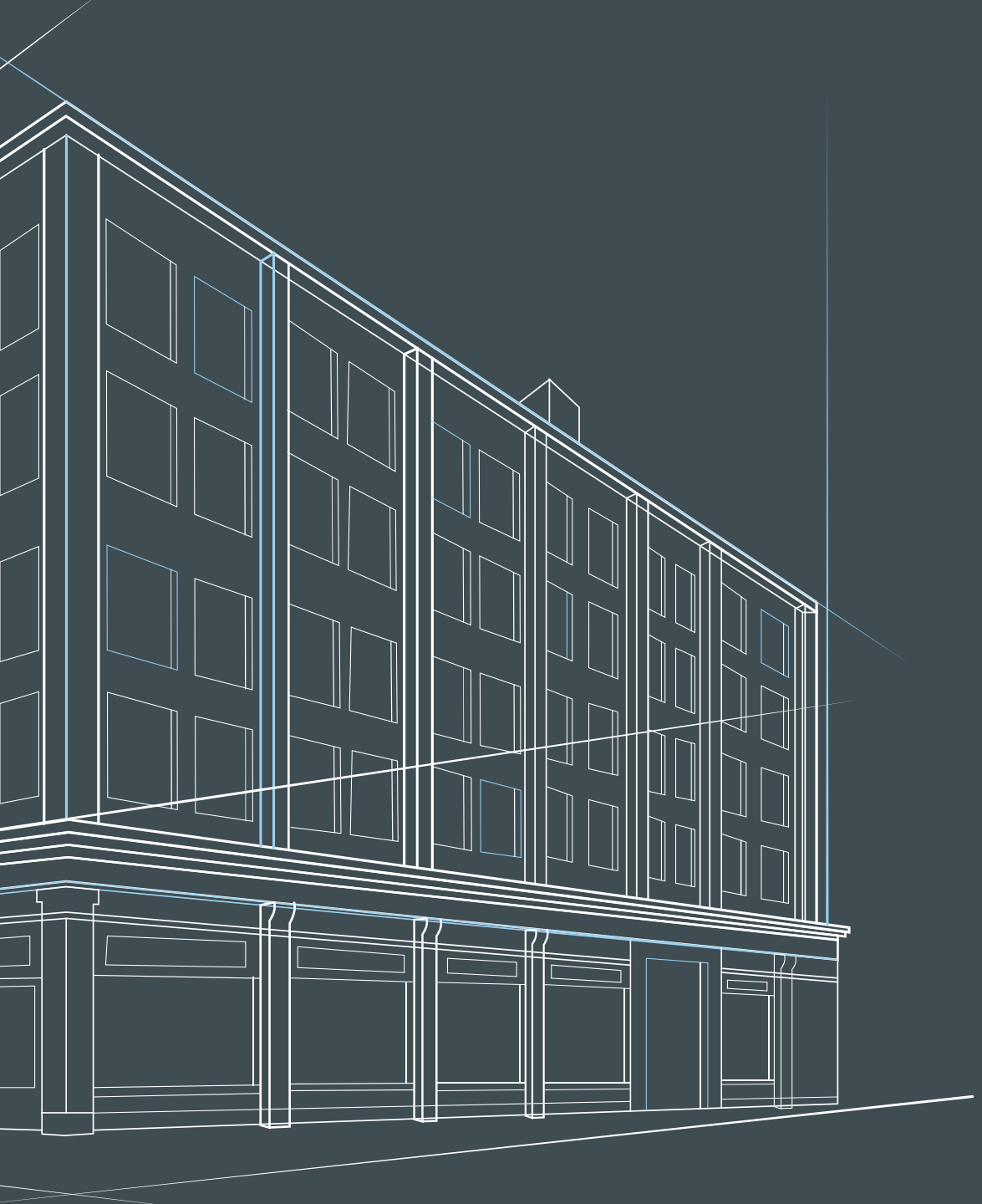

41

INDIKATOR 41

Layanan Kinerja Pegawai

LAYANAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

“Kinerja Pegawai adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan kinerja pegawai IPPD yang efektif, efisien dan akuntabel. Layanan Kinerja Pegawai IPPD berbasis Elektronik merupakan keluaran yang dihasilkan 1 atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan kinerja pegawai di IPPD”

TUJUAN/MANFAAT

- Memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan kinerja pegawai di IPPD
- Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan antar layanan SPBE

Ruang Lingkup	• Layanan Kinerja Pegawai berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh pada unit kerja / perangkat daerah dan **didokumentasikan berdasarkan kapabilitas fungsi teknis** ◦ Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi ◦ Penjelasan mengenai penerapan ◦ Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)

REFERENSI LAYANAN KINERJA PEGAWAI

- Perpres No. 95/2018 - SPBE
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE

INDIKATOR 41

Layanan Kinerja Pegawai

(1/2)

Level 1

IPPD sudah memiliki Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau penilaian kinerja pegawai

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi kinerja pegawai pada IPPD yang ditayangkan oleh sistem aplikasi

Level 2

IPPD sudah memiliki Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait kinerja pegawai seperti daftar penilaian kinerja pegawai

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti ada fitur pencarian, upload dan atau Download pelaporan pada Layanan Kinerja Pegawai

Level 3

IPPD sudah memiliki Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan dimana pengguna dapat mengunduh dan mengunggah informasi kinerja pegawai, dan sistem dapat merespon pengguna dengan mekanisme persetujuan dan validasi hasil kinerja pegawai

Dokumentasi dengan adanya fungsi untuk bertransaksi, selain adanya upload dan/atau download, sistem aplikasi juga memiliki fungsi transaksi data, validasi data, kemajuan status approval data, dan atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi

Level 4-5

INDIKATOR 41
Layanan Kinerja Pegawai

(2/2)

Level 4

IPPD sudah memiliki layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainya, seperti perencanaan, penganggaran dan/atau dengan layanan Kinerja pegawai IPPD lainnya

Kriteria Bukti Dukung:

- Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil integrasi layanan/middleware/ basis data seperti ditunjukan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya

Level 5

IPPD sudah dapat memiliki Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Instansi

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya
- Dokumentasi tindak lanjut/pengembangan juga dapat berupa optimalisasi kebijakan layanan, tata Kelola layanan, maupun manajemen layanan
- Terdapat notulensi dan hasil reviu dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE untuk aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan layanan SPBE

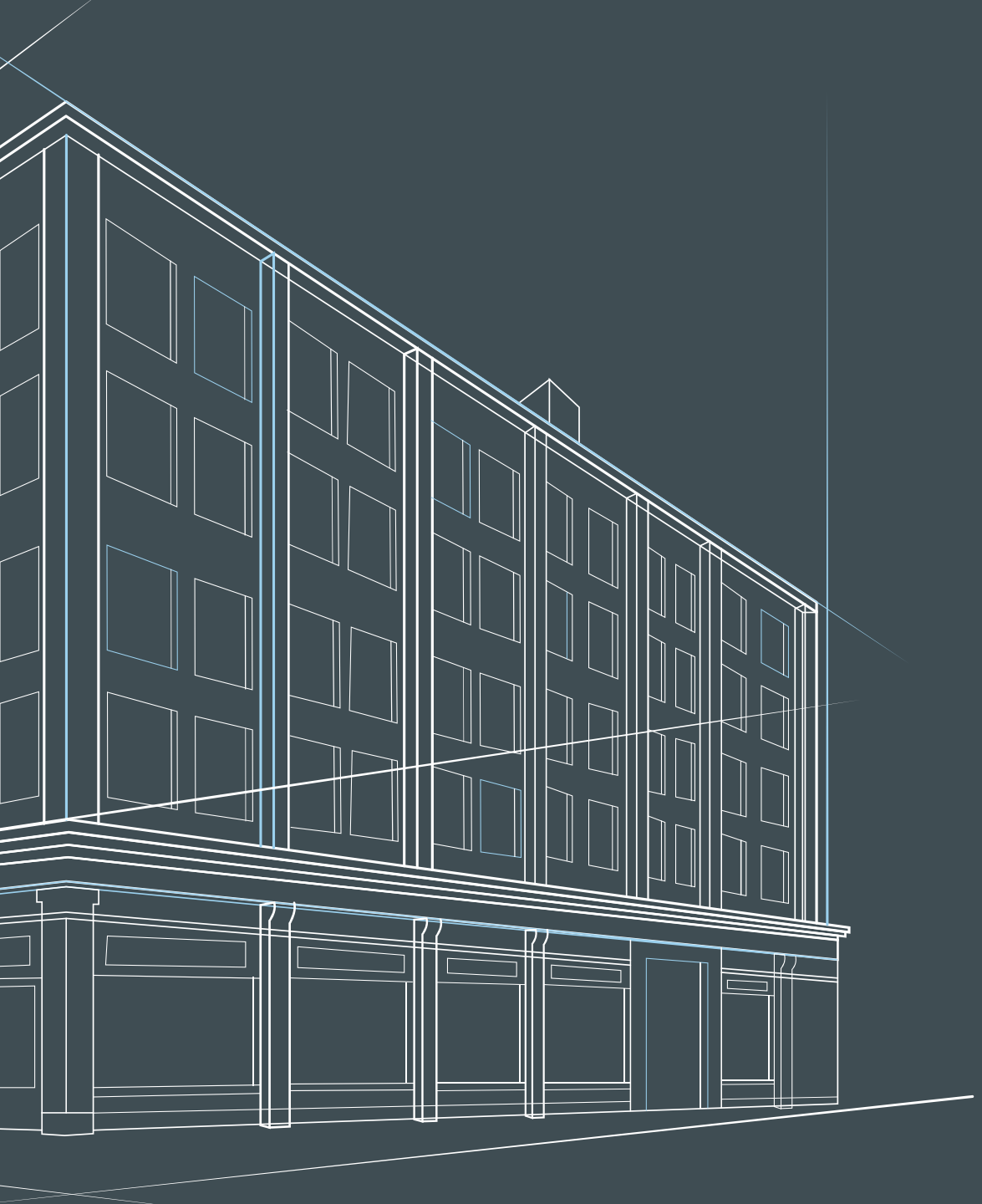

42

INDIKATOR 42

Layanan Pengaduan Pelayanan Publik

LAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

"Pengaduan Pelayanan Publik adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan pengaduan pelayanan publik IPPD yang efektif, efisien dan akuntabel."

TUJUAN/MANFAAT

- Menghasilkan pengelolaan pengaduan pelayanan publik IPPD yang efektif, efisien dan akuntabel
- Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan antar layanan SPBE
- Untuk kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik

Ruang Lingkup	• Layanan Pengaduan Pelayanan Publik berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh pada unit kerja / perangkat daerah dan **didokumentasikan berdasarkan kapabilitas fungsi teknis**
	  ◦ Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi
	  ◦ Penjelasan mengenai penerapan
	  ◦ Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)
	• Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, **wajib menggunakan LAPOR-SP4N yang telah ditetapkan sebagai Aplikasi Umum**

REFERENSI LAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

- Perpres No. 95/2018 - SPBE
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- KepmenPANRB No. 680/2020 Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
- Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE

INDIKATOR 42

Layanan Pengaduan Pelayanan Publik

(1/2)

Level 1

IPPD sudah memiliki Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau statistik pengaduan pelayanan publik

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi Pengaduan Pelayanan Publik pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi

Level 2

IPPD sudah memiliki Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait pengaduan pelayanan publik seperti Daftar Pengaduan Pelayanan Publik

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti ada fitur pencarian, upload dan atau Download pelaporan pada Layanan Pengaduan Publik

Level 3

IPPD sudah memiliki Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan dimana pengguna dapat mengunduh dan mengunggah informasi Pengaduan Pelayanan Publik, dan sistem dapat merespon pengguna dengan mekanisme persetujuan dan validasi pengaduan pelayanan publik

Dokumentasi dengan adanya fungsi untuk bertransaksi, selain adanya upload dan/atau download, sistem aplikasi juga memiliki fungsi transaksi data, validasi data, kemajuan status approval data, dan atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi

Level 4-5

INDIKATOR 42

Layanan Pengaduan Pelayanan Publik

(2/2)

Level 4

IPPD sudah memiliki layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainya, seperti kependudukan, perizinan dan/atau dengan layanan Pengaduan Pelayanan Publik IPPD lainnya

Kriteria Bukti Dukung:

- Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil integrasi layanan/middleware/ basis data seperti ditunjukan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya

Level 5

IPPD sudah memiliki Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan,teknologi dan kebutuhan instansi

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya
- Dokumentasi tindak lanjut/pengembangan juga dapat berupa optimalisasi kebijakan layanan, tata Kelola layanan, maupun manajemen layanan
- Terdapat notulensi dan hasil reviu dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE untuk aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan layanan SPBE

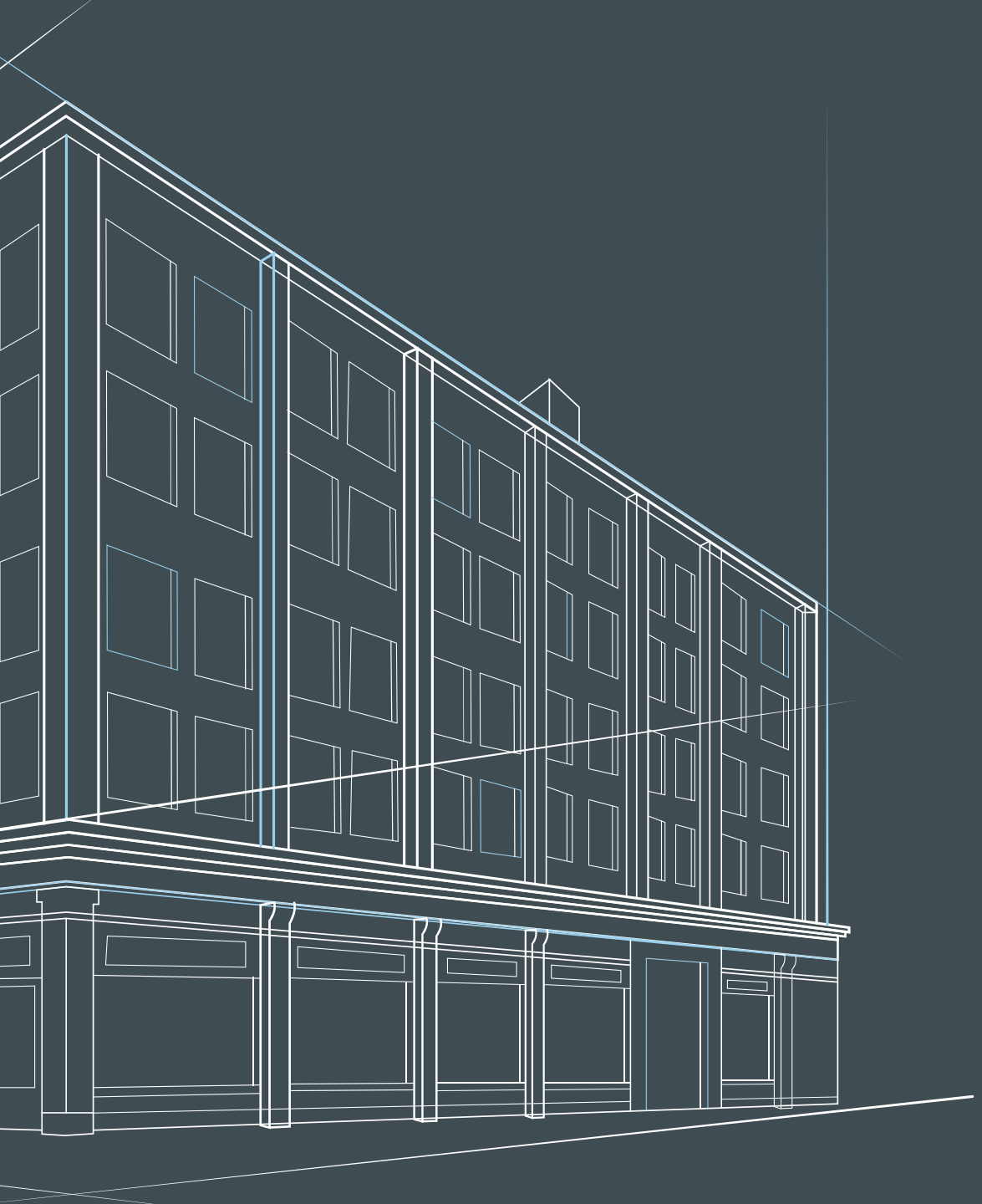

43

INDIKATOR 43

Layanan Data Terbuka

LAYANAN DATA TERBUKA

"Layanan Data Terbuka (Open Data) adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan data terbuka IPPD yang efektif, efisien dan akuntabel. Data terbuka merupakan sekumpulan data yang dikelola oleh IPPD yang dapat dibagi pakai oleh IPPD lain."

TUJUAN/MANFAAT

- Menghasilkan pengelolaan data terbuka IPPD yang efektif, efisien dan akuntabel
- Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan antar layanan SPBE

Ruang Lingkup	- Layanan Data Terbuka berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh pada unit kerja / perangkat daerah dan **didokumentasikan berdasarkan kapabilitas fungsi teknis**
	  - Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi
	  - Penjelasan mengenai penerapan
	  - Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)

REFERENSI LAYANAN DATA TERBUKA

- Perpres No. 95/2018 - SPBE
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE

INDIKATOR 43

Layanan Data Terbuka

(1/2)

Level 1

IPPD sudah memiliki Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau statistik penggunaan data terbuka

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi Data Terbuka pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi

Level 2

IPPD sudah memiliki Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait data terbuka seperti daftar inventaris data yang dibagi pakai

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti ada fitur pencarian, upload dan atau Download data terbuka

Level 3

IPPD sudah memiliki Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan dimana pengguna dapat mengunduh dan mengunggah informasi data terbuka, dan sistem dapat merespon pengguna dengan mekanisme persetujuan dan validasi data terbuka.

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi dengan adanya fungsi untuk bertransaksi, selain adanya upload dan/atau download, sistem aplikasi juga memiliki fungsi transaksi data, validasi data, kemajuan status approval data, dan atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi

Level 4-5

INDIKATOR 43
Layanan Data Terbuka

(2/2)

Level 4

IPPD sudah memiliki Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainya, seperti kependudukan, perizinan dan/atau dengan Layanan Data Terbuka IPPD lainnya

Kriteria Bukti Dukung:

- Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil integrasi layanan/middleware/ basis data seperti ditunjukan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya

Level 5

IPPD sudah memiliki Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan,teknologi dan kebutuhan instansi

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya
- Dokumentasi tindak lanjut/pengembangan juga dapat berupa optimalisasi kebijakan layanan, tata Kelola layanan, maupun manajemen layanan
- Terdapat notulensi dan hasil reviu dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE untuk aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan layanan SPBE

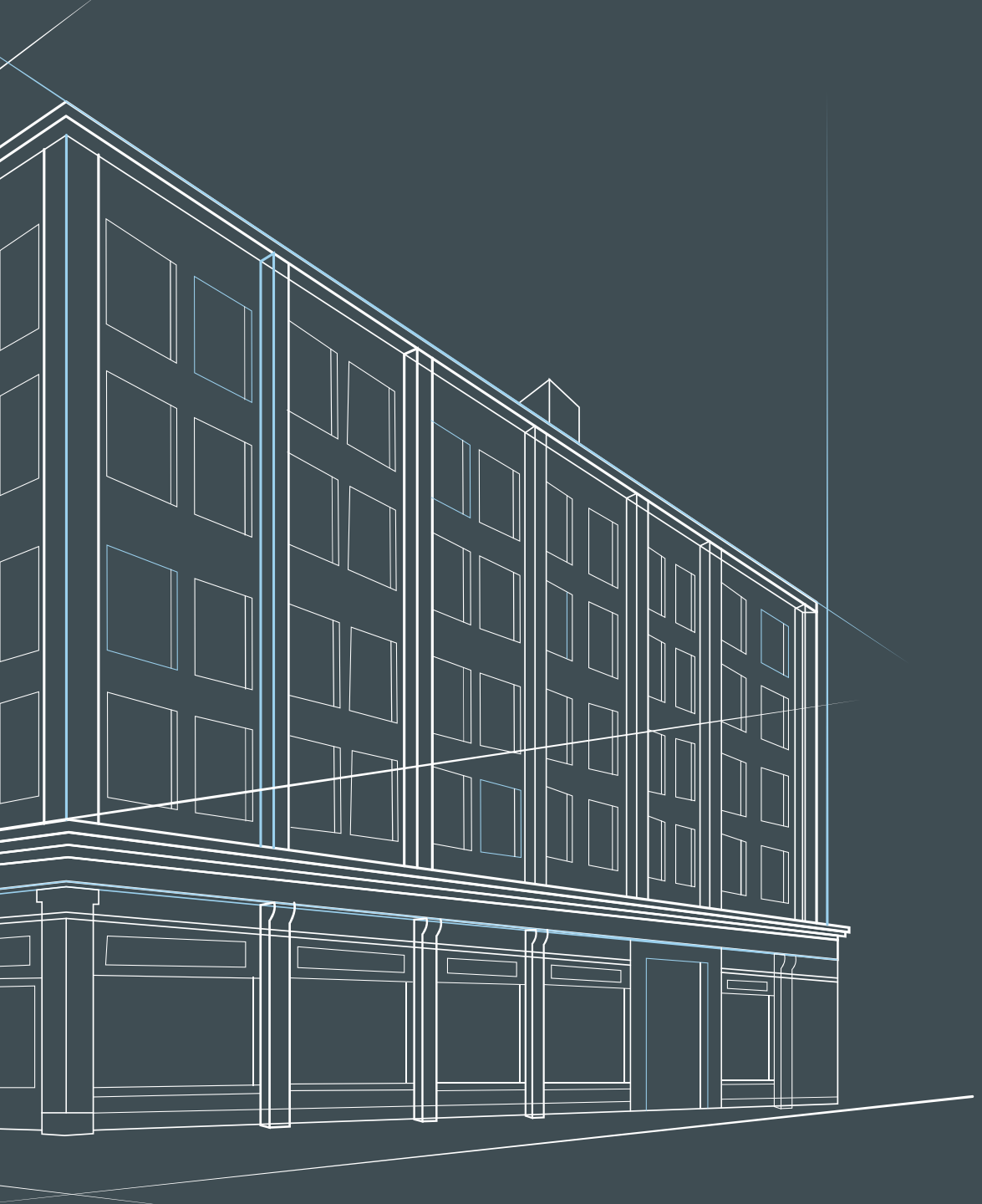

44

INDIKATOR 44

Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

LAYANAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

"Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum IPPD yang efektif, efisien dan akuntabel."

TUJUAN/MANFAAT

- Menghasilkan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum IPPD yang efektif, efisien dan akuntabel
- Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan antar layanan SPBE

Ruang Lingkup	- Layanan Data Terbuka berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh pada unit kerja / perangkat daerah dan **didokumentasikan berdasarkan kapabilitas fungsi teknis**
	  - Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi
	  - Penjelasan mengenai penerapan
	  - Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)

REFERENSI LAYANAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

- Perpres No. 95/2018 - SPBE
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE

INDIKATOR 44

Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

(1/2)

Level 1

IPPD belum atau sudah memiliki Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau statistik dokumentasi dan informasi hukum

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi produk hukum pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi

Level 2

IPPD sudah memiliki Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait data terbuka seperti dokumentasi dan informasi hukum

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti ada fitur pencarian, upload dan atau Download produk hukum

Level 3

IPPD sudah memiliki Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan dimana pengguna dapat mengunduh dan mengunggah informasi data terbuka, dan sistem dapat merespon pengguna dengan mekanisme persetujuan dan validasi dokumentasi dan informasi hukum

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi dengan adanya fungsi untuk bertransaksi, selain adanya upload dan/atau download, sistem aplikasi juga memiliki fungsi transaksi data, validasi data, kemajuan status approval data, dan atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi

Level 4-5

INDIKATOR 44

Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

(2/2)

Level 4

IPPD sudah memiliki Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainya, seperti kearsipan, kepustakaan dan/atau dengan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum IPPD lainnya

Kriteria Bukti Dukung:

- Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil integrasi layanan/middleware/ basis data seperti ditunjukan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya

Level 5

IPPD sudah memiliki Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik yang telah ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan,teknologi dan kebutuhan instansi

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya
- Dokumentasi tindak lanjut/pengembangan juga dapat berupa optimalisasi kebijakan layanan, tata Kelola layanan, maupun manajemen layanan
- Terdapat notulensi dan hasil reviu dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE untuk aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan layanan SPBE

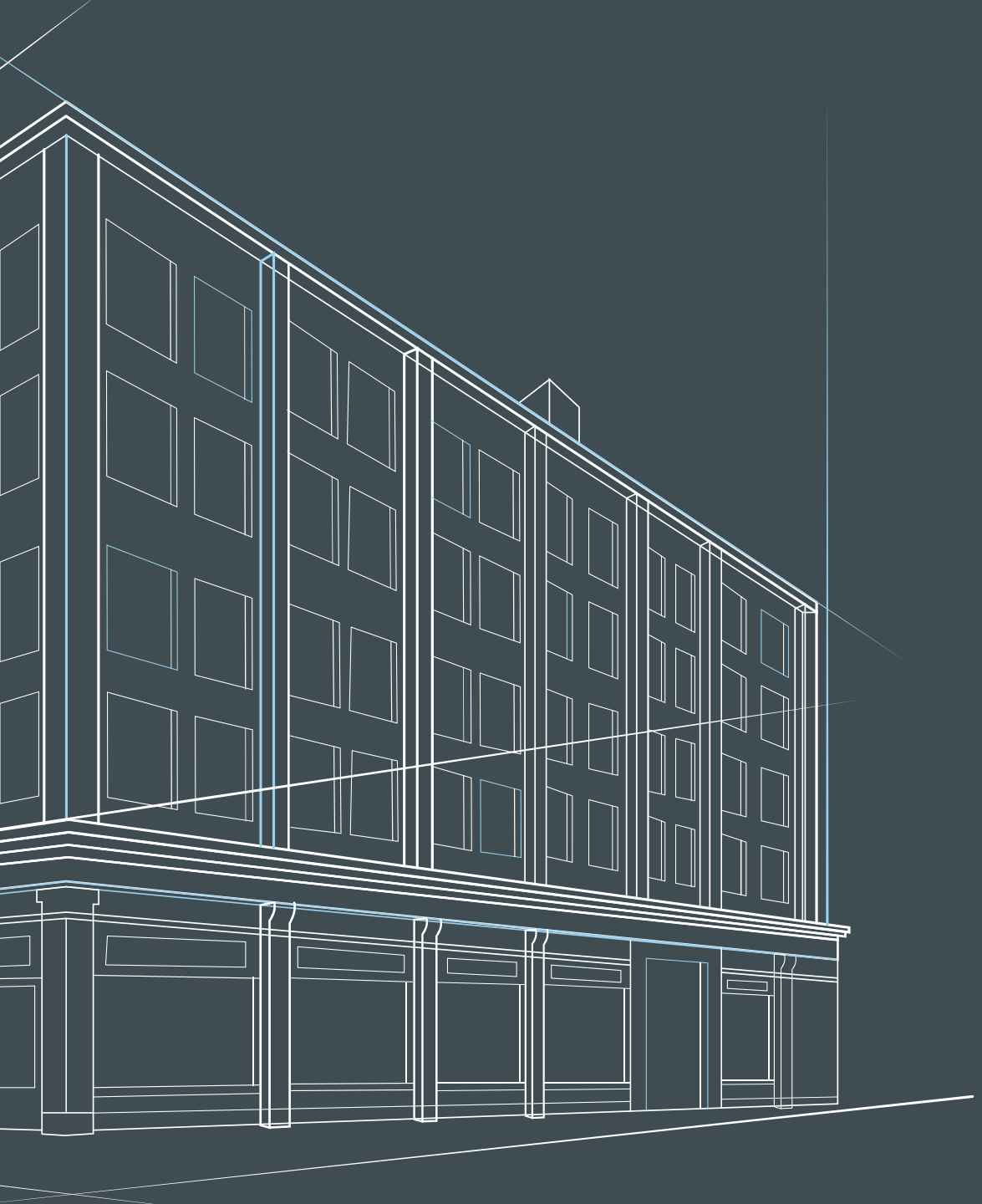

45

INDIKATOR 45

Layanan Publik Sektoral 1

LAYANAN PUBLIK SEKTORAL 1

"Layanan Publik Sektor adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan tugas dan fungsi sektoral IPPD yang efektif, efisien dan akuntabel."

TUJUAN/MANFAAT

- Menghasilkan pengelolaan tugas dan fungsi sektoral IPPD yang efektif, efisien dan akuntabel
- Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan antar layanan SPBE

Ruang Lingkup	• Layanan Publik Sektor yang dimaksud merupakan **layanan sektoral selain pada indikator 32-44** • Yang **dimaksud layanan publik sektoral** pada indikator ini adalah berupa layanan yang bersifat *Government to Citizen (G to C), Government to Business (G to B)*, maupun *Governemt to Government (G to G)* sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. • Layanan Publik Sektoral 1 berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh pada unit kerja / perangkat daerah dan **didokumentasikan berdasarkan kapabilitas fungsi teknis** ◦ Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi ◦ Penjelasan mengenai penerapan ◦ Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)

REFERENSI LAYANAN PUBLIK SEKTORAL 1

- Perpres No. 95/2018 - SPBE
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE

INDIKATOR 45

Layanan Publik Sektoral 1

(1/2)

Level 1

IPPD belum atau sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau statistik layanan publik sektoral

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi layanan sektoral pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi

Level 2

IPPD sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait layanan publik sektor seperti perizinan

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti ada fitur pencarian, upload dan atau Download

Level 3

IPPD sudah memiliki Layanan Jaringan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan dimana pengguna dapat mengunduh dan mengunggah informasi data terbuka, dan sistem dapat merespon pengguna dengan mekanisme persetujuan dan validasi terkait Layanan Publik Sektor

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi dengan adanya fungsi untuk bertransaksi, selain adanya upload dan/atau download, sistem aplikasi juga memiliki fungsi transaksi data, validasi data, kemajuan status approval data, dan atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi

Level 4-5

INDIKATOR 45

Layanan Publik Sektoral 1

(2/2)

Level 4

IPPD sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainya, seperti layanan Kependudukan, Perizinan dan/atau dengan Layanan Publik Sektor IPPD lainnya

Kriteria Bukti Dukung:

- Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil integrasi layanan/middleware/ basis data seperti ditunjukan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya

Level 5

IPPD sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang telah ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan,teknologi dan kebutuhan instansi

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya
- Terdapat notulensi dan hasil reviu dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE untuk aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan layanan SPBE
- IPPD dapat diberikan tingkat kematangan level 5 **secara langsung/tanpa memiliki fungsi teknis berjenjang** apabila sudah menggunakan aplikasi/layanan yang mendukung penerapan RB Tematik yaitu Akselarasi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, Pengentasan Kemiskinan, Kemudahan Investasi, dan Tematik Prioritas Presiden (inflasi, *stunting*, penggunaan produk dalam negeri, dll).

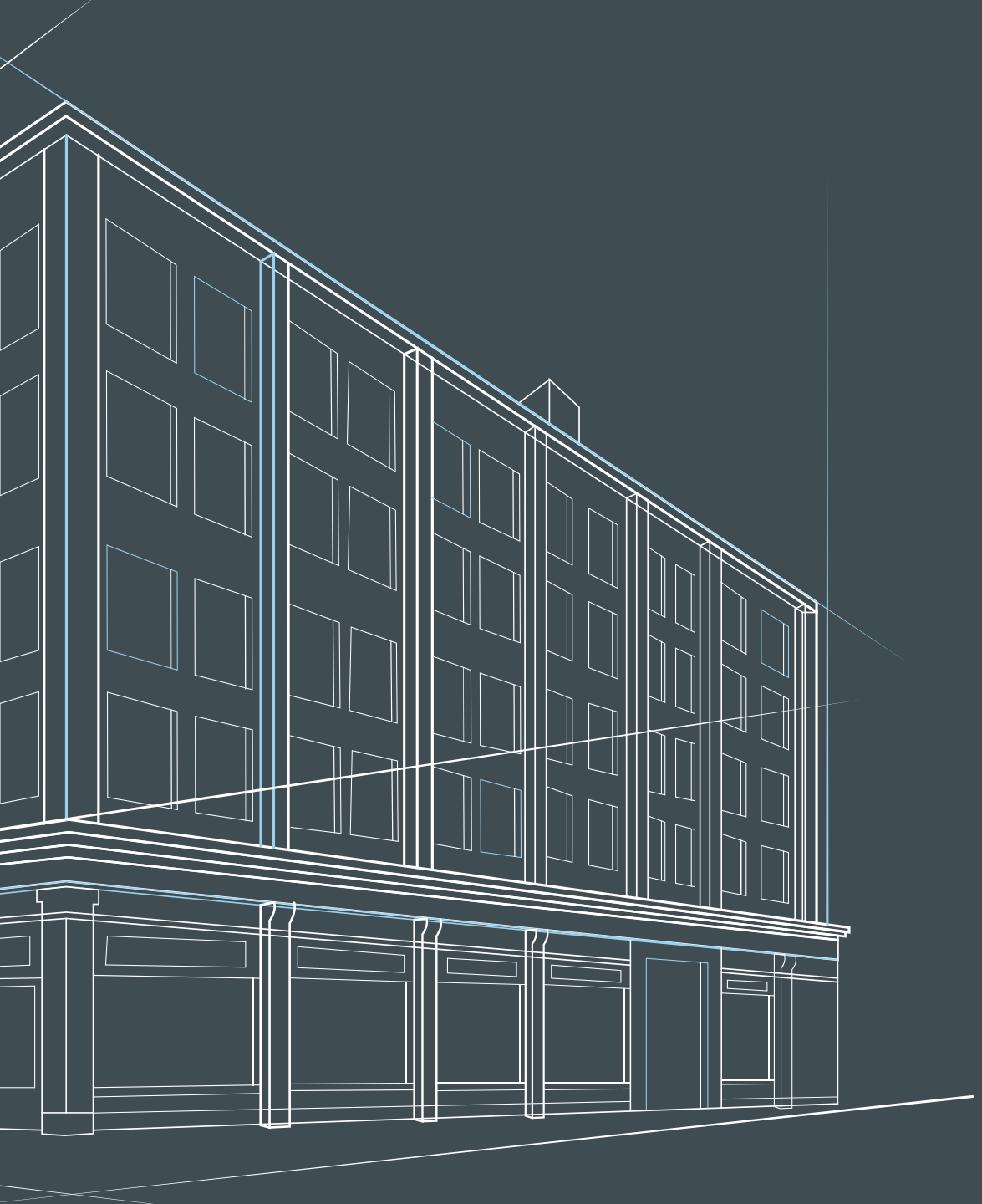

46

INDIKATOR 46

Layanan Publik Sektoral 2

LAYANAN PUBLIK SEKTORAL 2

"Layanan Publik Sektor adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan tugas dan fungsi sektoral IPPD yang efektif, efisien dan akuntabel."

TUJUAN/MANFAAT

- Menghasilkan pengelolaan tugas dan fungsi sektoral IPPD yang efektif, efisien dan akuntabel
- Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan antar layanan SPBE

Ruang Lingkup	• Layanan Publik Sektor yang dimaksud merupakan **layanan sektoral selain pada indikator 32-44** • Yang **dimaksud layanan publik sektoral** pada indikator ini adalah berupa layanan yang bersifat *Government to Citizen (G to C), Government to Business (G to B)*, maupun *Governemt to Government (G to G)* sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. • Layanan Publik Sektoral 2 berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh pada unit kerja / perangkat daerah dan **didokumentasikan berdasarkan kapabilitas fungsi teknis** ◦ Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi ◦ Penjelasan mengenai penerapan ◦ Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)

REFERENSI LAYANAN PUBLIK SEKTORAL 2

- Perpres No. 95/2018 - SPBE
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE

INDIKATOR 46

Layanan Publik Sektoral 2

(1/2)

Level 1

IPPD belum atau sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau statistik layanan publik sektoral

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi layanan sektoral pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi

Level 2

IPPD sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait layanan publik sektor seperti perizinan

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti ada fitur pencarian, upload dan atau Download

Level 3

IPPD sudah memiliki Layanan Jaringan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan dimana pengguna dapat mengunduh dan mengunggah informasi data terbuka, dan sistem dapat merespon pengguna dengan mekanisme persetujuan dan validasi terkait Layanan Publik Sektor

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi dengan adanya fungsi untuk bertransaksi, selain adanya upload dan/atau download, sistem aplikasi juga memiliki fungsi transaksi data, validasi data, kemajuan status approval data, dan atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi

Level 4-5

INDIKATOR 46
Layanan Publik Sektoral 2

(2/2)

Level 4

IPPD sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainya, seperti layanan Kependudukan, Perizinan dan/atau dengan Layanan Publik Sektor IPPD lainnya

Kriteria Bukti Dukung:

- Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil integrasi layanan/middleware/ basis data seperti ditunjukan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya

Level 5

IPPD sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang telah ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan,teknologi dan kebutuhan instansi

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya
- Terdapat notulensi dan hasil reviu dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE untuk aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan layanan SPBE
- IPPD dapat diberikan tingkat kematangan level 5 **secara langsung/tanpa memiliki fungsi teknis berjenjang** apabila sudah menggunakan aplikasi/layanan yang mendukung penerapan RB Tematik yaitu Akselarasi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, Pengentasan Kemiskinan, Kemudahan Investasi, dan Tematik Prioritas Presiden (inflasi, *stunting*, penggunaan produk dalam negeri, dll).

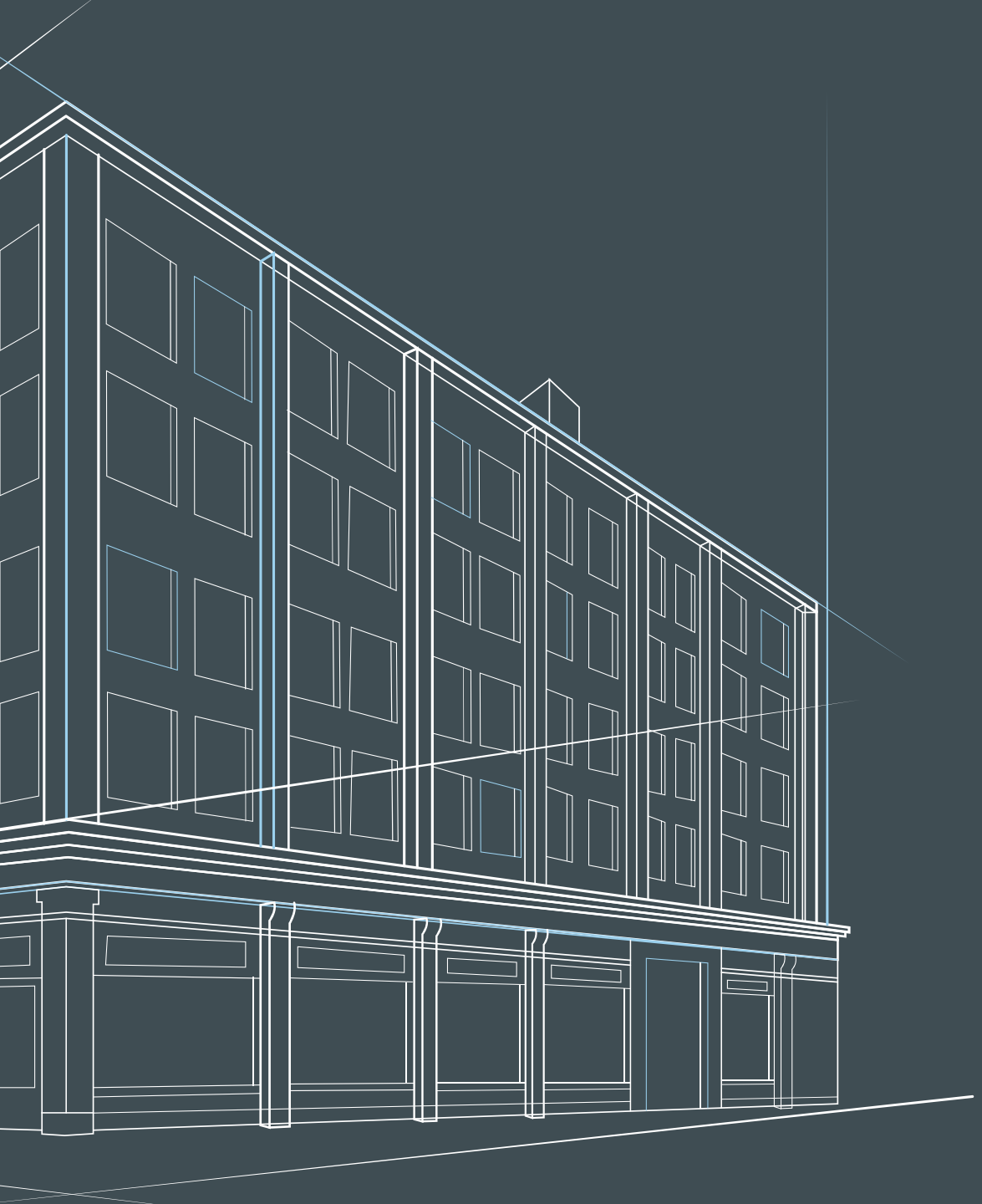

47

INDIKATOR 47

Layanan Publik Sektoral 3

LAYANAN PUBLIK SEKTORAL 3

"Layanan Publik Sektor adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan tugas dan fungsi sektoral IPPD yang efektif, efisien dan akuntabel."

TUJUAN/MANFAAT

- Menghasilkan pengelolaan tugas dan fungsi sektoral IPPD yang efektif, efisien dan akuntabel
- Meningkatkan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui keterpaduan antar layanan SPBE

Ruang Lingkup	• Layanan Publik Sektor yang dimaksud merupakan **layanan sektoral selain pada indikator 32-44** • Yang **dimaksud layanan publik sektoral** pada indikator ini adalah berupa layanan yang bersifat *Government to Citizen (G to C), Government to Business (G to B)*, maupun *Governemt to Government (G to G)* sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. • Layanan Publik Sektoral 3 berbasis elektronik telah diterapkan secara menyeluruh pada unit kerja / perangkat daerah dan **didokumentasikan berdasarkan kapabilitas fungsi teknis** ◦ Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi ◦ Penjelasan mengenai penerapan ◦ Manual Book (jika ada, untuk panduan penggunaan aplikasi)

REFERENSI LAYANAN PUBLIK SEKTORAL 3

- Perpres No. 95/2018 - SPBE
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE

INDIKATOR 47

Layanan Publik Sektoral 3

(1/2)

Level 1

IPPD belum atau sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau statistik layanan publik sektoral

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi layanan sektoral pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi

Level 2

IPPD sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait layanan publik sektor seperti perizinan

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti ada fitur pencarian, upload dan atau Download

Level 3

IPPD sudah memiliki Layanan Jaringan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan dimana pengguna dapat mengunduh dan mengunggah informasi data terbuka, dan sistem dapat merespon pengguna dengan mekanisme persetujuan dan validasi terkait Layanan Publik Sektor

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi dengan adanya fungsi untuk bertransaksi, selain adanya upload dan/atau download, sistem aplikasi juga memiliki fungsi transaksi data, validasi data, kemajuan status approval data, dan atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi

Level 4-5

INDIKATOR 47
Layanan Publik Sektoral 3

(2/2)

Level 4

IPPD sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainya, seperti layanan Kependudukan, Perizinan dan/atau dengan Layanan Publik Sektor IPPD lainnya

Kriteria Bukti Dukung:

- Adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan hasil integrasi layanan/middleware/ basis data seperti ditunjukan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya

Level 5

IPPD sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang telah ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan,teknologi dan kebutuhan instansi

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi menggambarkan adanya fungsi yang disajikan telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya
- Terdapat notulensi dan hasil reviu dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE untuk aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan layanan SPBE
- IPPD dapat diberikan tingkat kematangan level 5 **secara langsung/tanpa memiliki fungsi teknis berjenjang** apabila sudah menggunakan aplikasi/layanan yang mendukung penerapan RB Tematik yaitu Akselarasi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, Pengentasan Kemiskinan, Kemudahan Investasi, dan Tematik Prioritas Presiden (inflasi, *stunting*, penggunaan produk dalam negeri, dll).

panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

TERIMA KASIH